




RENSTRA 2025-2029

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA



<https://dp2kb.kukarkab.go.id/> 

Jl. Jend. Sudirman No.75,
Melayu, Kec. Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur 75512 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025–2029 sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029., Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA), dokumen ini disusun dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan program pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, dan pembangunan ketahanan keluarga.

Penyusunan RENSTRA 2025–2029 ini dirancang sebagai pedoman pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana (KB), dan pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen ini mencakup berbagai kebijakan strategis yang disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat, melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan terkait, serta memprioritaskan pencapaian target yang terukur, relevan, dan berkelanjutan.

Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan keluarga berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing, serta mendukung pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara menuju masa depan yang lebih baik.

Tenggarong, Oktober 2025

Plt.Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara



Dafin Haryanto, S.Sos., M.Si

NIP. 197009241990 03 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	13
1.3 Maksud dan Tujuan.....	17
1.3.1 Maksud.....	17
1.3.2 Tujuan.....	17
1.4 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	21
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	36
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia.....	36
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana.....	37
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah.....	47
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	74
2.1.5 Kerja Sama Daerah.....	78
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	83
2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	83
2.2.1.1 Tantangan.....	83
2.2.1.2 Peluang.....	86
2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	88
2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	92
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	99
3.1 Tujuan.....	99

3.2	Sasaran.....	99
3.3	Strategi Dan Arah Kebijakan.....	102
3.4	Pentahapan Renstra.....	110
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....		113
4.1	Program Perangkat Daerah.....	113
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	254
BAB V PENUTUP		258

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPPKB, Kabupaten Kutai Kartanegara	36
Tabel 2. 2 Jumlah dan Komposisi SDM Menurut Golongan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara	37
Tabel 2.3 Data Sarana dan Prasarana DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara	38
Tabel 2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara	48
Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Kinerja Layamam Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara	49
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara	67
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Kunci	71
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja	73
Tabel 2.9 Daftar Kerja Sama Daerah	80
Tabel 2.9 Tantangan yang dihadapi DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara	83
Tabel 2.10 Peluang yang dapat dimanfaatkan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara	86
Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	89
Tabel 2.12 Penentuan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	101
Tabel 3.2 Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	102
Tabel 3.3 Pemetaan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.....	109
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	111
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	114
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	195
Tabel 4.3 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029	249

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.....	251
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	255
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	255

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD. 11	
Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Lebih lanjut, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD setelah pelantikan kepala daerah. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Demikian halnya dengan Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun yang diimplementasikan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun secara tahunan.

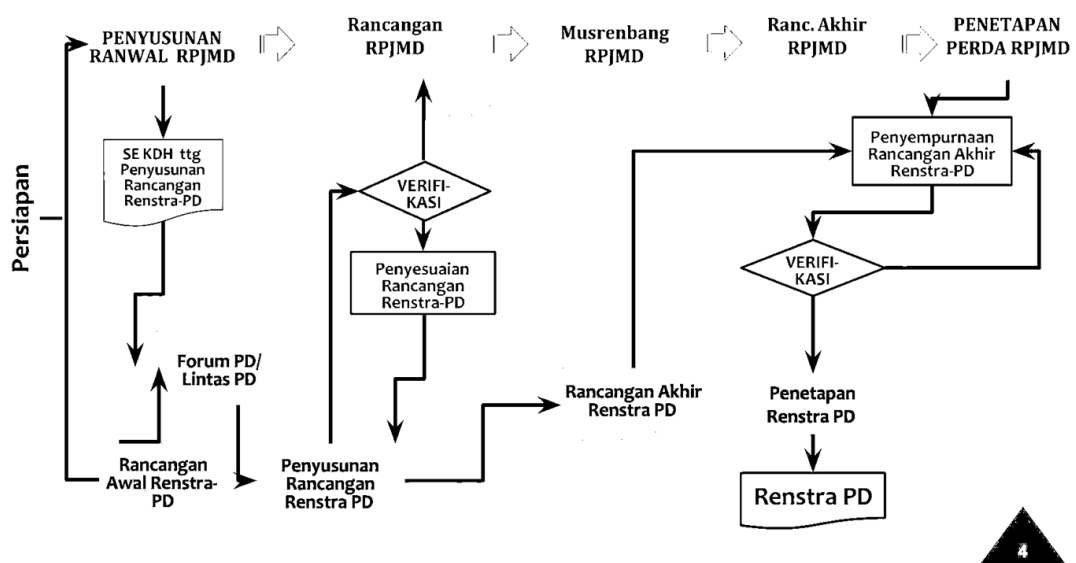
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ini dilaksanakan dalam momentum penting, yaitu setelah selesainya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara telah secara resmi menetapkan dr. Aulia Rahman Basri dan H. Rendi Solihin sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan 2025-2030, yang kemudian dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur, pada tanggal 23 Juni 2025.

Pelantikan ini menandai dimulainya era kepemimpinan baru yang membawa visi dan misi pembangunan yang segar, sebagaimana ditekankan oleh Gubernur dalam sambutannya mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Visi kepemimpinan baru ini, yang berfokus pada potensi besar Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), menuntut adanya penyesuaian strategi dan program di setiap perangkat daerah. Oleh karena itu, Renstra ini disusun sebagai instrumen vital untuk menterjemahkan visi dan misi kepemimpinan baru tersebut ke dalam program kerja konkret, khususnya dalam bidang kependudukan dan kualitas keluarga dengan mengedepankan prinsip integritas, transparansi, dan kolaborasi demi pembangunan manusia berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun hubungan keterkaitan antara tahapan penyusunan RPJMD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD



Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD

Keterkaitan antara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mencerminkan hubungan strategis dan teknis yang mendukung sinergi perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan arahan dari RPJMD, yang menjadi dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimulai dengan merujuk pada Rancangan Akhir RPJMD, yang kemudian disesuaikan dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD.

Proses ini melibatkan koordinasi antara lintas perangkat daerah, forum perangkat daerah, dan evaluasi substansi melalui tahap verifikasi. Setelah Rancangan Akhir RPJMD disahkan menjadi Perda RPJMD, perangkat daerah melakukan penyempurnaan Renstra agar selaras dengan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Sinergi ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan berjalan secara sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pada Pasal 108 hingga 124. Prosedur ini melibatkan serangkaian tahapan yang terukur untuk memastikan kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan.

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap terakhir adalah penetapan Rancangan Akhir Renstra menjadi dokumen resmi paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Penetapan ini dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Dinas, yang menjadi dasar hukum dan legitimasi bagi pelaksanaan semua program dan kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan penetapan ini, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana resmi menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Berikut adalah landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- 3) Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
- 4) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
- 5) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 No.4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6757)
- 7) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
- 8) Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- 9) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 13)

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5614)
- 11) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 2);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310)
- 13) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 376);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 377);
- 16) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. 19);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. xxx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. xxx);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2020);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 Nomor 163);
- 23) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 Nomor 177);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah

tahun 2024-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 178, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 88 Tahun 2024)

25) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 Nomor 180 , Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 90).

26) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. xxx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029; (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 No. xxx);

27) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 Nomor 48).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan Pembangunan jangka menengah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi para pemangku kepentingan, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dengan dokumen ini, Pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan

Renstra ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan berikut:

- 1) Mengidentifikasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2) Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 3) Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
- 4) Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- 5) Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
- 6) Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 7) Menyiapkan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 8) Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi:

- 1) Latar Belakang: pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Plafond Lima Tahun Renstra.
- 2) Dasar Hukum Penyusunan: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 3) Maksud dan Tujuan: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 4) Sistematika Penulisan: Uraian garis besar isi dokumen.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini meliputi:

- 1) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a) Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah;
 - b) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - c) Kelompok sasaran layanan
 - d) Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
 - e) Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
 - f) Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
- 2) Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b) Isu strategis.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikatornya dalam tabel. Menguraikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Menguraikan Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perangkat Daerah; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V: PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023.

DPPKB menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau provinsi.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tugas pokok ini meliputi penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DPPKB juga bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau provinsi.

Sebagai instansi yang berfokus pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta ketahanan keluarga, DPPKB berperan strategis dalam mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program-program unggulan, DPPKB memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu menjawab

kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPPKB menjalankan berbagai fungsi yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1) Perumusan dan Koordinasi Kebijakan

DPPKB bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kebijakan ini disusun berdasarkan kebutuhan lokal dengan memperhatikan arahan kebijakan nasional dan provinsi. Koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya juga dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam menjalankan tugasnya, DPPKB melaksanakan berbagai program strategis yang mencakup penyediaan layanan keluarga berencana, advokasi, penyuluhan, serta penguatan ketahanan keluarga. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan membangun keluarga yang sejahtera.

3) Pengelolaan Administrasi

DPPKB menyelenggarakan tata kelola administrasi yang mencakup pengelolaan kepegawaian, perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan aset. Fungsi ini memastikan bahwa operasional dinas berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Monitoring dan Evaluasi

DPPKB melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur keberhasilan program, mengidentifikasi hambatan, dan

merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

5) Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam rangka mendukung pemerintah pusat atau provinsi, DPPKB melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang diberikan, seperti distribusi alat kontrasepsi, pendampingan kepada kelompok masyarakat, dan penyediaan data kependudukan yang akurat.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara dirancang berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023. Struktur ini disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Struktur organisasi DPPKB terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, bidang-bidang teknis, kelompok jabatan fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Berikut adalah rincian struktur organisasi DPPKB:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat yang membawahkan dan mengordinasikan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk;
- 4) Bidang KB;
- 5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- 7) UPTD.

Berdasarkan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara, diuraikan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;

Kepala Dinas memiliki tugas mengoordinasikan perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. mengoordinasikan penyusunan laporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta penyusunan program dan keuangan;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta penyusunan program dan keuangan;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja/, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
- administrasi umum Perangkat Daerah;
 - pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah;
 - penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
 - perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
 - administrasi keuangan Perangkat Daerah.
- f. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan

melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta penyusunan program dan keuangan;

- g. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- c. melaksanakan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Pengukuran Kinerja, dan Sasaran Kinerja Pegawai), keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan

- masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Pengukuran Kinerja, dan Sasaran Kinerja Pegawai), Rekonsiliasi dan Laporan Aset, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan:
 - (i) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - (ii) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
 - (iii) fasilitasi kunjungan tamu;
 - (iv) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
 - (v) penatausahaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah;
 - (vi) dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Perangkat Daerah;
 - (vii) pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - (viii) pengadaan alat besar, alat angkutan darat tak bermotor, mebel, peralatan dan mesin lainnya;
 - (ix) pengadaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
 - (x) pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - (xi) penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- (xii) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor;
- (xiii) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional/lapangan;
- (xiv) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar, serta alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya;
- (xv) penyediaan jasa pemeliharaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
- (xvi) penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, serta tanah;
- (xvii) peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
- (xviii) pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
- (xix) pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Kartu Suami, penghargaan, pemberian sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
- (xx) koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- (xxi) monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- (xxii) pemulangan pegawai yang pensiun dan yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
- (xxiii) pemindahan tugas pns;

- (xxiv) pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
 - (xxv) sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- f. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
 - h. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

3) Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta data dan informasi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta data dan informasi;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta data dan informasi;
- e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang pengendalian penduduk yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dan/atau inspektorat daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (lhkasn), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta data dan informasi;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan

- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

4) Bidang KB

Bidang KB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang KB yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang KB mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE), pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- KB, serta jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan KB. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang KB mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE), pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, serta jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan KB;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE), pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, serta jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan KB;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE), pembinaan dan

- peningkatan kesertaan ber-KB, serta jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan KB;
- e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
- pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal;
 - pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di Daerah kabupaten/kota; dan
 - pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- f. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Keluarga Berencana yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE), pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, serta jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan KB;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

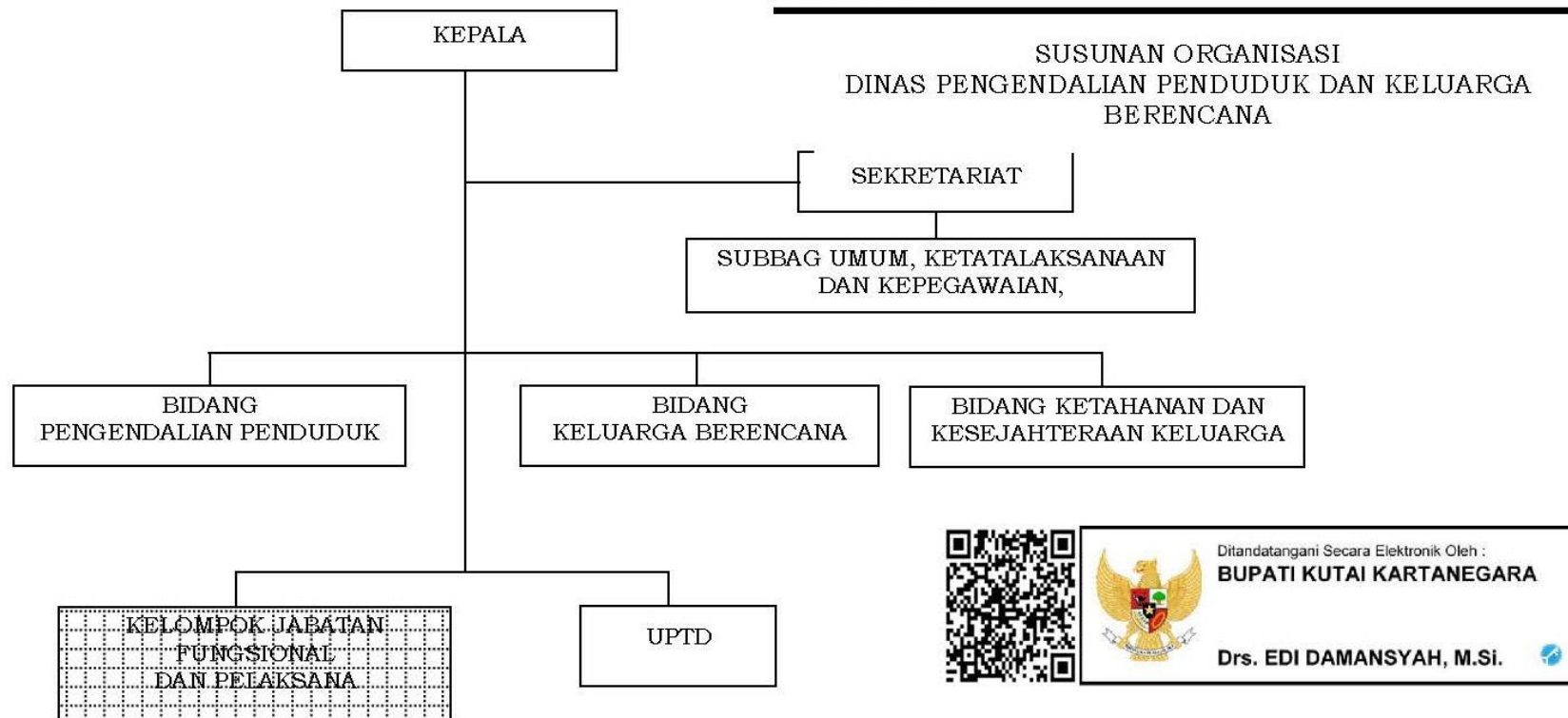
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pembinaan ketahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pembinaan ketahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pembinaan ketahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan pembinaan ketahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- f. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pembinaan ketahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - c. Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - e. Sistem dan Mekanisme Kerja kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- 7) UPTD

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2023 TANGGAL 11 OKTOBER 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber daya yang dimiliki oleh DPPKB mencakup sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Berikut adalah gambaran rinci mengenai sumber daya perangkat daerah yang dikelola oleh DPPKB.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan terlatih di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sumber daya manusia ini terdiri dari berbagai kategori, yaitu:

1) Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi SDM DPPKB dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan, baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS. Berikut adalah rincian jumlah dan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 2.1 Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPPKB, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Tingkat Pendidikan	PNS	P3K	Non PNS/PLKB	Jumlah
1	SLTA	12	5	13	30
2	Diploma III	1			1
3	Strata 1	24	3		27
4	Strata 2	10			10
	Total	47	8	13	68

Sumber: Data Kepegawaian DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan minimal Strata 1, menunjukkan kualitas SDM yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program

strategis DPPKB. Pegawai dengan pendidikan SLTA dan Diploma III biasanya mendukung kegiatan administratif dan teknis di lapangan.

2) Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Jumlah dan komposisi SDM DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Golongan sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Jumlah dan Komposisi SDM Menurut Golongan
DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Golongan	PNS	P3K	Non PNS	Jumlah
1	Golongan V		5		5
2	Golongan IX		3		3
3	Golongan II	12			12
4	Golongan III	25			25
5	Golongan IV	10			10
	Total	47	8		55

Sumber: Data Kepegawaian DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Dari data tersebut, terlihat bahwa struktur SDM DPPKB cukup proporsional antara jenjang pendidikan dan kepangkatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional di berbagai bidang. Penyuluh lapangan KB sebagai garda terdepan di lapangan didukung oleh pegawai dengan golongan dan tingkat pendidikan yang relevan.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen utama yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, operasional administrasi, dan kegiatan teknis lainnya.

**Tabel 2.3 Data Sarana dan Prasarana DPPKB Kabupaten Kutai
Kartanegara**

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	
2	Station Wagon	Avanza / 1.3 GM/T	2	Rusak Ringan	
3	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Toyota / Rush 1500	1	Rusak Ringan	
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Toyota / Avanza 1300	2	Rusak ringan	
5	Sepeda Motor	Honda / Vario 125	41	Baik	
6	Sepeda Motor	Honda / 160 Csb	9	Baik	
7	Sepeda Motor	Honda / CRF 150 L	18	Baik	
8	Handy Cam	SONY / DVDGIE	1	Baik	
9	Printer	Epson / LQ300	5	Baik	
10	Printer	CANON / IP1980	3		
11	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Donati / Kursi Sopa	1	Baik	
12	Alat Studio Lainnya	Maono / 1x Mixer USB Podcast Recording tech PRO RT X6, 4x	1	Baik	
13	Video Conference	Logitech PTZ PRO 2 / Camera 1080p HD	1	Baik	
14	Video Conference	JETE / 1080	1	Baik	
15	Tenda	Rainbow	3	Baik	
16	Lap Top	AXIO/MY Book L5 (8N2)	23	Baik	
17	Laptop	Acer / Core i5	3	Baik	
18	P.C Unit	Axio / Ram 8 GB	2	Baik	
19	P.C Unit	Axio / One Pro K5-24 (16N5)	15	Baik	
20	Printer	Epson / L5290 All-in-One	1	Baik	
21	Printer	EPSON ECOTANK / L3210	1	Baik	

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
22	Printer	Epson / L3211	4	Baik	
23	Printer	Brother / P250 W	20	Baik	
24	Printer	Workforce / WF 100	6	Baik	
25	Scanner	Brother ADS / 330 w	20	Baik	
26	Modem	Prolink / DL 7303	2	Baik	
27	A.C. Split	Panasonic / YN9WKJ	9	Unit	
28	Kipas Angin	SEKAI / 2676	2	Unit	
29	Kursi Fiber Glas/Plastik	Krisbow / Kursi Lipat	12	Baik	
30	Rak Peralatan	Brother / Rak Serbaguna	16	Baik	
31	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Donati / ecco zova	20	Baik	
32	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Expo / MT3001 ND	21	Baik	
33	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Donati ester / WS 2pF	7	baik	
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Donati / DOD 20	6	Baik	
35	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	6	Baik	
36	Rak Besi	Brother / Rak	21	Baik	
37	Lemari Besi/Metal	Brother / B.304	21	Baik	
38	Lemari Penyimpan	Almari / B 202	20	Baik	
39	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother / STandar F4	8	Baik	
40	Lemari Kaca	Lemari Kaca / Etalase	2	Baik	
41	Kursi Fiber Glas/Plastik	Krisbow / Kursi Lipat	12	Baik	
42	A.C. Split	Panasonic / CU-LN9WKJ Spit	7	Baik	
43	Kipas Angin	Sharp / PJ-A36TV-W	2	Baik	
44	Microphone/Wireless MIC	KREZT / DT D-37 H	4	Baik	
45	Laptop	Acer / 1165 G7	8	Baik	
46	Printer	Epson / L3250	10	Baik	
47	Modem	Orbit / 5 G H1	6	Baik	
48	Tenda Pleton	Consina / Tenda Ploton	2	Baik	
49	Lampu Gynaecologi	blizmad / LED Lamp Standing	9	Baik	

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
50	A.C. Split	Panasonic / YN18AKJ	9	Baik	
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 2359	7	Baik	
52	Kursi Rapat	CHITOSE	20	Baik	
53	Rak Besi	Alba / SR 4	10	Baik	
54	Lemari Buku	Kokubi	15	Baik	
55	Lemari Penyimpan	Almari / B 202	10	Baik	
56	Mesin Ketik Manual	Brother / Standar F4	15	Baik	
57	Lemari Besi/Metal	Brother / B.304	11	Baik	
58	Kipas Angin	KDK	6	Baik	
59	Alat Kedokteran umum	Balmed / BM 2506	8	Baik	
60	Server	LG	1	Baik	
61	Notebook	Lenovo / G40 - 70	30	Baik	
62	Rak Kayu	Mitsubithi / L33N Triplek	11	Baik	
63	White Board	Pitex / Megnetis Formika	6	Baik	
64	Meja Rapat	High Point	22	Baik	
65	Slide Projector	Toshiba	3	Baik	
66	Lemari Kayu	Kokubi / Lemari Buku	6	Baik	
67	Transportable Water Pump	Sanyo	1	Baik	
68	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Rusak Berat	
69		Jl. Jend.Sudirman No.75 Kec.Tenggarong			
70	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
71		Jl. Riduansyah RT 01Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut			
72	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
73		Jl. Palancari RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak			
74	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
75		Jl Ir Sukarno RT 06 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa			
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
77		Jl. Jendral Sudirman Gang Swadaya RT 03 Desa Sebulu Moderen Kecamatan Sebulu			
78	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
79		Jl. Udang No 28 RT 28 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong (Koplek Kantor Camat Tenggarong)			
80	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
81		Desa Sumbersari Kecamatan Loa Kulu			
82	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
83		Jl. KH Dewantara RT 18 (Komplek Kantor Camat Kota Bangun)			

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
84	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
85		Jl Sukarno-Hata KM 4 (Komplek Perkantoran kantor Camat Loa Janan)			
86	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
87		Jl. Balikpapan - Handil II RT 05 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja			
88	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
89		Jl. Jongkar Raya RT 08 Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan			
90	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
91		Jl. Pahlawan RT 16 Kelurahan Karang Tunggal Kec Tenggara Seberang			
92	Pagar Permanen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jl. Jenderal Sudirman No 2 RT 4 Kelurahan Melayu Tenggara	1	Baik	
93	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl. Mulawarman RT 15 Desa Muara Kaman	1	Baik	

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
		Ulu Kecamatan Muara Kaman			
94	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
95		Jl. Mulawarman RT 15 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman			
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
97		Jl. Dinas no 7 RT 17 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu			
98	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
99		Jl. Mulawarman RT. 01, Desa Sungai Meriam, Kec. Anggana			
100	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jalan Ra Kartini Rt. 001 Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai	1	Baik	
101	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana JL. Poros Muara Wis Sebemban Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis	2	Baik	
102	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
103		Jl Balikpapan Hansil II Kelurahan			

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
		Kampung Lama Kecamatan Samboja			
104	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
105		Jl Mulawarman RT 1 Desa Sungai Mariam			
106	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
107		JL. Corong RT 16 Kelurahan Sanga Sang Dalam Kecamatan Sanga -Sanga			
108	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
109		Jl Dinas No 7 RT 17 Desa Sebuntal Marangkayu			
110	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
111		Jl. Palancari RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak			
112	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
113		Jl Mulawarman RT 1 Desa Sungai Mariam			
114	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
115		JL. Corong RT 16 Kelurahan Sanga Sang Dalam Kecamatan Sanga -Sanga			

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
116	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
117		Jl Dinas No 7 RT 17 Desa Sebuntal Marangkayu			
118	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
119		Jl. Gas Alam Desa Batu Batu Kec. Muara Badak			
120	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
121		Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan			
122	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
123		Komplek Kantor Camat Kota Bangun			
124	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
125		Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang			
126	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Komplek Kantor Camat Samboja Jl Samarinda Balikpapan	1	Baik	
127	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sebulu	1	Baik	
128	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
129		Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang			
130	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan	1	Baik	
131	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Komplek Kantor Camat Sambija	1	Baik	
132	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut	1	Baik	
133	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut	1	Baik	
134	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sebulu	1	Baik	

Sumber: KIB, DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Data Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup berbagai aset yang mendukung operasional dan pelayanan program di lapangan. Sarana transportasi meliputi kendaraan operasional seperti station wagon Toyota Avanza, sepeda motor, dan mesin genset, yang seluruhnya dalam kondisi baik. Selain itu, terdapat peralatan kantor berupa PC unit, laptop, printer, proyektor, whiteboard, dan kursi rapat yang tersebar di

berbagai kantor dan mendukung kegiatan administrasi serta pelayanan. DPPKB juga memiliki sejumlah bangunan kantor permanen yang tersebar di beberapa lokasi strategis, seperti Kecamatan Tenggarong, Muara Badak, dan Muara Muntai, dengan sebagian besar bangunan dalam kondisi baik. Infrastruktur pendukung lainnya meliputi jaringan distribusi tegangan listrik kapasitas 1-20 KVA dan jaringan sambungan ke rumah kapasitas kecil yang tersebar di wilayah pedesaan seperti Desa Bhuna Jaya, Desa Kembang Janggut, dan Kecamatan Kenohan. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang baik, DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kesiapan yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan program pengendalian penduduk serta keluarga berencana di wilayah tersebut.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara, gambaran pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini. Tabel ini memuat informasi mengenai target indikator kinerja, capaian realisasi, dan rasio ketercapaiannya yang mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan, serta selanjutnya adalah Tabel 2.6 yang memuat tentang Rencana Anggaran beserta Realisasi Anggaran DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode Rencana Strategis sebelumnya.

Tabel 2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Rasio			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,22	2,20	2,18	2,16	2,53	2,39	2,13	2,24	87,75%	92,05%	102,35%	96,43%
Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	25,00	30,00	35,00	40,00	42,00	12,00	29,00	45,76	168,00%	40,00%	82,86%	114,40%
Indek pembangunan Keluarga	57,00	57,50	58,50	60,00	54,91	9,33	63,34	66,96	96,33%	16,23%	108,27%	111,60%
Nilai SAKIP DPPKB	85,00	85,10	85,40	85,55	73,18	72,23	75,60	61,24	86,09%	84,88%	88,52%	71,58%

Sumber: Data yang diolah DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025.

Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Kinerja Layamam Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1). Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85	85,1	85,4	85,55	45	75,6	61,24	63,78	52,94%	88,84%	71,71%	74,55%
						2). Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
						3). Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
						4). Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKP per Tanggal 31 Maret	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
						5). Tingkat Kepatuhan LHKASN per Tanggal 31 Maret	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
						6). Predikat Tata Kelola		63	63	63	70	45	55	64	73	71,43%	87,30%	101,59%	104,29%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
						Arsip Perangkat Daerah													
2	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPPKB	dokumen	120	144	144	177	120	144	144	144	100,00%	100,00%	100,00%	81,36%
2	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	80	4	4	5	80	4	4	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	dokumen	0	40	40	40	0	40	40	40	n.a	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P	dokumen	0	20	20	20	0	20	20	20	n.a	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	dokumen	0	40	40	40	0	40	40	40	n.a	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P	dokumen	0	20	20	20	0	20	20	20	n.a	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	laporan	0	12	12	12	0	12	12	12	n.a	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	dokumen	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio					
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel															
2	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	bulan	0	12	12	12	0	12	12	12	n.a	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	laporan	40	40	40	40	33	40	40	40	82,50%	100,00%	100,00%	100,00%		
2	1	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1	1	1	1	0	1	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan	Laporan	1	1	1	1	0	1	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	25	68	68	68	25	68	68	68	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Paket	0	0	140	0	0	0	140	0	n.a	n.a	100,00%	n.a
2	1	1	2,1	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	25	20	20	10	25	20	20	25	100,00%	100,00%	100,00%	250,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	1	1	2,05	9	Pendidikana dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	0	0	8	25	0	0	8	25			100,00%	100,00%
2	1	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	42	42	42	42	42	42	42	42	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	40	30	30	30	40	30	30	3	100,00%	100,00%	100,00%	10,00%
2	1	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	2	4	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%
2	1	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	lembar	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Koran	Eksemplar	440	440	440	440	440	440	440	440	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	1	1	2,	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	laporan	120	150	150	150	76	150	150	150	63,33%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Yang Ditata	Dokumen	1	1	1	1	0	1	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Pada DPPKB	Unit	23	23	22	30	23	23	22	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	10	7	7	15	0	7	7	15	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	##	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	0	60	0	0	0	60	0	n.a	n.a	100,00%	n.a
2	1	1	2,	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan pagar Balai Penyuluhan KB	Unit	1	1	0	0	0	1	0	0	0,00%	100,00%	n.a	n.a
2	1	1	2,	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Sarana Prasarana Gedung Kantor	Unit	20	15	15	15	0	15	15	15	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio				
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
2	1	1	2,		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	Unit	171	171	148	148	171	171	148	148	148	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio					
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
2	1	1	2,	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Serta Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Unit	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Serta Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Unit	160	160	160	160	14	160	160	160	160	160	8,75%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	1	2,	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1). Cakupan stakeholder yang	Persen	25	30	35	40	25	30	35	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
						terlibat dalam program KKBPK													
						2). Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	14	2	2		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
					Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen	Dokumen	Na	1	1	1	Na	1	1	n.a	100,00%	100,00%	100,00%	
2	14	2	2	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	Na	1	1	0	Na	1	1	0	n.a	100,00%	100,00%	n.a
2	14	2	2	5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah / Perguruan Tinggi	Unit	Na	6	6	6	Na	4	6	6	n.a	66,67%	100,00%	100,00%
2	14	2	2	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi	Jumlah Materi	Paket	Na	35	35	223	Na	35	35	223	n.a	100,00%	100,00%	100,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
					Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
2	1	2	2	1	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta	Orang	80	40	80	80	45	40	80	80	n.a	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	2	2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	2	2	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Data	Data Base	Na	1	1	1	Na	1	1	1	n.a	100,00%	100,00%	100,00%
2	1	2	2	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Buku Profil	Buah/buku	Na	0	1	1	Na	0	1	1	n.a		100,00%	100,00%
2	1	2	2	1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah KK	KK	2000	5000	10000	10000	2000	2000	10000	10000	n.a	40,00%	100,00%	100,00%
2	1	2	2	1	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang terdata	Unit	43	43	43	43	43	43	43	43	n.a	100,00%	100,00%	100,00%
																n.a			
2	1	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1). Persentase pemakaian kontrasepsi	Persen	77,10	77,15	77,19	77,20	n.a	88,00	5,00	72,00	n.a	114,06%	6,48%	93,26%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
						(CPR) cara modern													
						2). Persentase peserta KB Baru	Persen	15,10	15,13	15,15	15,17	n.a	26,00	15,00	82,00	n.a	171,84%	99,01%	540,54%
						3). Cakupan angka unmet need	Persen	12,50	12,50	11,50	11,00	n.a	43,00	10,00	8,00	n.a	344,00%	86,96%	72,73%
						4). Persentase akseptor MKJP	Persen	16,03	16,05	16,08	16,10	n.a	250,00	16,00	19,00	n.a	1557,63%	99,50%	118,01%
						5). Persentase Drop Out (DO)	Persen	12,42	12,32	12,22	12,12	n.a	45,00	12,00	3,00	n.a	365,26%	98,20%	24,75%
2	1	3	2			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Event	5,00	5,00	5,00	5,00	n.a	100,00	6,00	5,00	n.a	2000,00%	120,00%	100,00%
2	1	3	2	1		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Event	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%
2	1	3	2	2		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sarana KIE	-	2,00	2,00	2,00	n.a	n.a	1,00	20,00	n.a	n.a	50,00%	1000,00%
2	1	3	2	3		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana KIE	-	1,00	1,00	1,00	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a		

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	1	3	2	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah kegiatan promosi	Kali	-	-	5,00	5,00	n.a	2,00	2,00	5,00	n.a	n.a	40,00%	100,00%
2	1	3	2	5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media	Media	1,00	1,00	3,00	3,00	n.a	n.a	3,00	n.a	n.a	n.a	100,00%	n.a
2	1	3	2	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah peserta	Kegiatan	54,00	108,00	108,00	108,00	38,00	18,00	89,00	98,00	70,37%	16,67%	82,41%	90,74%
2	1	3	2	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah kegiatan di Balai Penyuluhan KB	Kegiatan	18,00	18,00	18,00	18,00	17,00	17,00	16,00	51,00	94,44%	94,44%	88,89%	283,33%
2	1	3	2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	Desa	237,00	237,00	237,00	237,00	n.a	50,00	228,00	227,00	n.a	21,10%	96,20%	95,78%
2	1	3	2	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP yang dibina	Kelompok	237,00	237,00	237,00	237,00	n.a	n.a	47,00	87,00	n.a	n.a	19,83%	36,71%
2	1	3	2	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung	Unit	5,00	5,00	69,00	69,00	n.a	n.a	n.a	###	n.a	n.a		2384,06%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	1	3	2	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB / PLKB	Orang	69,00	69,00	69,00	69,00	n.a	n.a	69,00	49,00	n.a	n.a	100,00%	71,01%
2	1	3	2	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD / Sub PPKBD	Desa	237,00	###	237,00	237,00	231,00	###	106,00	227,00	97,47%	92,30%	44,73%	95,78%
2	1	3	2		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan	40,00	40,00	40,00	40,00	35,00	32,00	77,00	5,00	87,50%	80,00%	192,50%	12,50%
2	1	3	2	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes	Unit	40,00	40,00	40,00	40,00	35,00	39,00	30,00	40,00	87,50%	97,50%	75,00%	100,00%
2	1	3	2	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Aksetpr MKJP	Orang	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00	###	###	###	42,86%	453,57%	285,86%	418,43%
2	1	3	2	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB	Jenis	1,00	3,00	3,00	3,00	1,00	9,00	33,00	3,00	100,00%	300,00%	1100,00%	100,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	1	3	2	1	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor yang dilayani	Orang	480,00	320,00	400,00	400,00	n.a	320,00	18,00	40,00	n.a	100,00%	4,50%	10,00%
2	1	3	2		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS / POKJA	Persen	40,00	60,00	65,00	70,00	n.a	75,00	26,00	29,00	n.a	125,00%	40,00%	41,43%
2	1	3	2	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas dan Mitra Kerja	Kampung KB	38,00	38,00	38,00	38,00	n.a	38,00	10,00	0,00	n.a	100,00%	26,32%	0,00%
2	1	3	2	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Bernilai Baik	Desa / Kampung	0,00	20,00	40,00	60,00	0,00	20,00	40,00	11,00	n.a	100,00%	100,00%	18,33%
2	1	3	2	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Bernilai Baik	Desa / Kampung	38,00	20,00	40,00	60,00	2,00	27,00	37,00	56,00	5,26%	135,00%	92,50%	93,33%
2	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1). Cakupan Anggota BKB ber-KB i	Persen	90,18	65,31	67,25	69,78	56,92	65,00	104,00	100,00	63,12%	99,53%	154,65%	143,31%
						2). Cakupan	Persen	95,05	72,97	76,13	80,93	48,90	73,00	49,00	80,00	51,45%	100,04%	64,36%	98,85%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
						Anggota BKR ber-KB													
						3). Cakupan Anggota BKL ber-KB	Persen	90,18	57,32	58,15	59,36	35,00	57,00	61,00	80,00	38,81%	99,44%	104,90%	134,77%
						4). Pusat Pelayanan KS (PPKS)	Persen	1,00	2,00	3,00	5,00	1,00	2,00	7,00	5,00	100,00%	100,00%	233,33%	100,00%
						5). Cakupan Remaja Dalam PIK-R/M	Persen	100,00	50,00	66,70	77,78	183,33	50,00	12,00	n.a	183,33%	100,00%	17,99%	n.a
						6). Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS ber-KB Mandiri	Persen	40,67	56,09	60,82	64,65	137,18	56,00	58,00	n.a	337,30%	99,84%	95,36%	n.a
2	1	4	2	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	25,00	30,72	32,50	35,75	n.a	31,00	99,00	96,00		100,91%	304,62%	268,53%
2	1	4	2	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah penyediaan sarana kelompok	Unit	37,00	54,00	30,00	30,00	21,00	41,00	34,00	30,00	56,76%	75,93%	113,33%	100,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	1	4	2	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang dilatih	Orang	434,00	75,00	80,00	240,00	434,00	145,00	### ##	240,00	100,00%	193,33%	1397,50%	100,00%
2	1	4	2	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok	Kelompok	200,00	132,00	238,00	394,00	n.a	51,00	51,00	394,00	n.a	38,64%	21,43%	100,00%
2	1	4	2	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	Orang	-	150,00	150,00	150,00	n.a	150,00	150,00	n.a	n.a	100,00%	100,00%	n.a
2	1	4	2	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah lomba-lomba	Laporan	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%
2	1	4	2	9	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan	Dokumen	Dokumen	-	1,00	-	1,00	n.a	0,00	0,00	1,00	n.a	n.a	n.a	100,00%

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
					Program yang Mendukung Tercapainya IPK														
2	1	4	2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	30,00	50,00	60,00	70,00	n.a	50,00	85,00	80,00	n.a	100,00%	141,67%	114,29%
2	1	4	2	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kerjasama dengan mitra dan ormas	Dokumen	5,00	18,00	18,00	4,00	n.a	35,00	35,00	22,00	n.a	194,44%	194,44%	550,00%
2	1	4	2	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	Orang	40,00	120,00	120,00	68,00	40,00	120,00	120,00	n.a	100,00%	100,00%	100,00%	n.a
2	1	4	2	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan	Jumlah peserta	Orang	-	28,00	35,00	42,00	n.a	50,00	50,00	n.a	n.a	178,57%	142,86%	n.a

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Rasio			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja														

**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Uraian	Anggaran Tahun ke-1 (2021)	Anggaran Tahun ke-2 (2022)	Anggaran Tahun ke-3 (2023)	Anggaran Tahun ke-4 (2024)	Realisasi Tahun ke-1 (2021)	Realisasi Tahun ke-2 (2022)	Realisasi Tahun ke-3 (2023)	Realisasi Tahun ke-4 (2024)	Rasio Capaian Tahun ke-1 (2021)	Rasio Capaian Tahun ke-2 (2022)	Rasio Capaian Tahun ke-3 (2023)	Rasio Capaian Tahun ke-4 (2024)
1	Total Anggaran Belanja	12.611.142.929	9.085.377.377	32.030.197.289	34.505.040.734	12.611.142.929	6.991.509.966	25.866.909.684	29.745.372.305	100,00%	76,95%	80,76%	86,21%
2	Belanja Pegawai	6.841.210.988	6.491.352.020	6.924.361.641	8.970.084.829	6.841.210.988	6.491.352.020	6.924.361.641	7.487.681.130	100,00%	100,00%	100,00%	83,47%
3	Belanja Barang dan Jasa	5.769.931.941	2.594.025.916	12.974.749.798	25.154.518.905	5.769.931.941	2.594.025.916	12.974.749.798	21.898.511.175	100,00%	100,00%	100,00%	87,06%
4	Belanja Modal	-	-	5.967.798.245	380.473.000	-	-	5.967.798.245	359.180.000	-	-	100,00%	94,40%

Sumber: Data yang diolah, Tahun 2025

Evaluasi Renstra Periode 2021-2026

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Secara umum, terdapat pergerakan naik dan turun pada setiap indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Fokus utama dalam penilaian ini meliputi penurunan Angka Kelahiran Total (TFR), cakupan stakeholder program BANGGA KENCANA, Indeks Pembangunan Keluarga, dan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Data realisasi menunjukkan bahwa tidak semua target dapat tercapai secara konsisten, meskipun ada beberapa indikator yang melampaui sasaran yang ditetapkan.

Indikator Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (Wanita Usia Subur 15-49 tahun) menunjukkan tren realisasi yang fluktuatif tetapi mayoritas di atas target. Target TFR direncanakan menurun dari 2,22 di tahun 2021 menjadi 2,16 di tahun 2024. Secara rasio, realisasi di tahun 2021 dan 2024 berada di bawah target (87,75 persen dan 96,43 persen), yang menunjukkan bahwa angka kelahiran yang dicapai belum serendah yang ditargetkan. Namun, tahun 2022 dan 2023 menunjukkan rasio di atas 100 persen (102,35 persen di 2023), menandakan bahwa TFR yang dicapai lebih rendah daripada target tahun tersebut, yang merupakan capaian positif dalam upaya pengendalian penduduk.

Capaian pada indikator Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA sangat berfluktuasi. Di tahun 2021, realisasi mencapai 168,00 persen dari target, menunjukkan partisipasi yang luar biasa. Namun, di tahun 2022, capaian merosot drastis menjadi hanya 40,00 persen, sebelum akhirnya meningkat signifikan lagi di tahun 2024 menjadi 114,40 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Keluarga menunjukkan kinerja yang cenderung membaik setelah awal yang rendah, dengan realisasi di tahun 2021 hanya 96,33 persen dari target dan tahun 2022 hanya 16,23 persen (angka 9,33 berbanding target 57,50). Capaian ini kemudian melampaui target di tahun 2023 dan 2024 (108,27 persen dan 111,60

persen), mengindikasikan perbaikan substansial dalam pembangunan keluarga.

Indikator Nilai SAKIP DPPKB menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi. Target nilai SAKIP direncanakan meningkat setiap tahun, dari 85,00 di tahun 2021 menjadi 85,55 di tahun 2024. Namun, realisasi nilai SAKIP menunjukkan tren yang menurun. Realisasi tertinggi dicapai di tahun 2021 (73,18 atau 86,09 persen dari target), kemudian menurun hingga mencapai nilai terendah di tahun 2024 (61,24 atau 71,58 persen dari target). Penurunan ini, terutama di tahun 2024, mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pemenuhan target kinerja dan peningkatan akuntabilitas yang perlu segera diatasi oleh DPPKB Kutai Kartanegara. Pada Tabel 2.6, pengelolaan anggaran dan realisasi pendanaan oleh DPPKB menunjukkan kinerja yang positif dan terus membaik dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, dinas ini telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, meskipun ada fluktuasi. Tren positif terlihat dari peningkatan rasio penyerapan total anggaran, yang naik dari 77 persen di tahun 2022 menjadi 86,2 persen di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dinas semakin efektif dalam mengelola dan memanfaatkan dana publik untuk mendukung program-programnya.

Efisiensi yang luar biasa terlihat pada pos Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Selama tiga tahun berturut-turut, yaitu dari 2021 hingga 2023, realisasi kedua jenis belanja ini mencapai 100 persen. Pencapaian ini menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang sangat solid dan akuntabel, memastikan bahwa dana untuk operasional, penggajian, dan kebutuhan barang/jasa terserap sepenuhnya. Kinerja konsisten ini menjadi fondasi penting untuk memastikan kelancaran seluruh kegiatan dinas.

Di sisi lain, pemanfaatan Belanja Modal juga menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi. Meskipun data yang tersedia terbatas, realisasi belanja modal pada tahun 2023 mencapai 100 persen, menandakan bahwa seluruh dana investasi untuk aset dan infrastruktur berhasil digunakan. Di tahun 2024, realisasinya juga tetap tinggi, yaitu 94,4 persen. Angka-angka ini

mencerminkan komitmen dinas dalam berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik secara maksimal.

Secara keseluruhan, data anggaran dan realisasi pendanaan ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan efektif. Dinas ini tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan terus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana siap melanjutkan program-programnya dengan dukungan finansial yang kuat. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan perlunya pendekatan yang lebih dinamis dan responsif dalam pengelolaan program dan anggaran untuk mengatasi perubahan kondisi dan memastikan pencapaian target Renstra secara berkelanjutan. Hal ini akan memungkinkan Dinas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur strategis yang esensial dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja suatu instansi. IKK berfungsi sebagai tolok ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai sejauh mana tujuan strategis telah tercapai. Capaian IKK Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Kunci

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI				CAPAIAN			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	2,20	2,18	2,10	2,53	2,39	2,13	2,24	-	108,64 %	97,71%	106,67 %
2.m.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR))	-	77,15	77,19	77,20	74,62	61,13	66,91	71,79	-	79,24%	86,68%	92,99%
2.m.3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)	-	12,00	11,50	11,00	14,72	24,97	12,79	7,93	-	208,08 %	111,22 %	72,09%

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang tidak seragam, khususnya pada indikator TFR (Angka Kelahiran Total). Target TFR direncanakan menurun progresif, namun realisasi menunjukkan fluktuasi signifikan. Setelah mengalami kenaikan Angka Kelahiran Total yang cukup besar di tahun 2022 (2,39 berbanding target 2,20, dengan capaian 108,64 persen—di mana persentase di atas 100 persen berarti kinerja buruk), perbaikan sempat terlihat di tahun 2023 dengan realisasi 2,13 yang sedikit lebih baik dari target (97,71 persen). Sayangnya, tren positif ini tidak berlanjut, karena TFR kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 2,24, yang sekali lagi melebihi target dan menandakan tantangan berkelanjutan dalam upaya stabilisasi dan penurunan angka kelahiran.

Kinerja pada aspek program Keluarga Berencana (KB) menunjukkan gambaran campuran. Indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR) secara konsisten berada di bawah target yang ditetapkan, meskipun terjadi tren kenaikan dari realisasi terendah di tahun 2022 (61,13 persen atau 79,24 persen dari target) menuju 71,79 persen di tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan akses dan sosialisasi kontrasepsi modern masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai sasaran di atas 77 persen. Sebaliknya, indikator Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) berhasil menunjukkan kemajuan signifikan pada akhir periode. Meskipun terjadi lonjakan tinggi di awal (2022 dan 2023), realisasi di tahun 2024 anjlok menjadi 7,93 persen, jauh lebih rendah dari target 11,00 persen. Hal ini menghasilkan capaian 72,09 persen, yang menunjukkan keberhasilan substansial dalam menutup kesenjangan kebutuhan ber-KB di masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja IKK menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Kartanegara sukses besar dalam mengatasi *Unmet Need*, menunjukkan efektivitas intervensi dalam memenuhi permintaan layanan KB yang sebelumnya

tertunda. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya tercermin dalam hasil akhir Angka Kelahiran Total, yang masih menunjukkan realisasi di atas target pada sebagian besar tahun yang dievaluasi. Sementara itu, indikator MCPR menunjukkan tantangan sistemik dalam meningkatkan adopsi metode kontrasepsi modern. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu memfokuskan upaya untuk memastikan keberlanjutan penurunan *Unmet Need* sambil secara intensif meningkatkan MCPR dan menstabilkan TFR agar berada di bawah ambang batas yang ditargetkan

Capaian Indiakator Kinerja

Capaian kinerja yang telah diraih pada periode sebelumnya menjadi landasan fundamental dalam merumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang. Rekam jejak keberhasilan historis ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti efektivitas program-program yang telah berjalan, tetapi juga sebagai modal berharga untuk menentukan target yang lebih relevan. Dengan menganalisis capaian ini secara cermat, tujuannya dapat menetapkan arah strategis yang kuat dan terukur, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam Renstra baru akan membangun di atas fondasi keberhasilan yang telah ada, sekaligus mengatasi tantangan yang masih perlu diselesaikan di masa depan.

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	n.a	54,9	58,6	63,34	66,96
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Nilai	n.a	n.a	n.a	n.a	71,9

Sumber: BKKBN, 2025

Tabel 2.8 ini menunjukkan pencapaian dua indikator utama yang dapat merefleksikan keberhasilan pembangunan di bidang keluarga dan

kependudukan. Keduanya menjadi alat penting untuk mengukur dampak program yang telah dijalankan.

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) adalah alat ukur yang menilai kualitas dan ketahanan keluarga, mencakup delapan fungsi dasar keluarga, mulai dari aspek keagamaan hingga lingkungan. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pula ketahanan keluarga di suatu wilayah. Data menunjukkan tren positif yang sangat konsisten pada Indeks Pembangunan Keluarga. Dimulai dari angka 54,9 di tahun 2021, indeks ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2022, nilainya naik menjadi 58,6, kemudian melonjak ke 63,34 di tahun 2023, hingga akhirnya mencapai 66,96 di tahun 2024. Peningkatan yang stabil ini membuktikan keberhasilan program-program yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) mengukur sejauh mana pembangunan telah mengintegrasikan dinamika kependudukan. Tujuannya adalah memastikan kebijakan pembangunan selaras dengan karakteristik populasi, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan demografi. Meskipun data yang tersedia terbatas, capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan pada tahun 2024 menunjukkan nilai yang menjanjikan, yaitu 71,9. Angka ini menjadi titik awal yang kuat untuk mengukur kinerja di tahun-tahun mendatang. Capaian awal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengintegrasikan isu-isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan, menciptakan landasan yang baik untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Penentuan kelompok sasaran layanan adalah aspek krusial dalam perumusan strategi dan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara. Identifikasi yang tepat terhadap siapa yang akan menerima manfaat langsung dari berbagai layanan DPPKB akan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian

visi dan misi. Mengacu pada mandat dan tugas pokok fungsi DPPKB, serta mempertimbangkan dinamika demografi dan sosial masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini hingga lima tahun ke depan, kelompok sasaran layanan utama DPPKB adalah sebagai berikut:

1. Individu dan Pasangan Usia Subur (PUS)

Kelompok ini menjadi inti program Keluarga Berencana (KB) karena mereka berada dalam fase reproduksi aktif. Intervensi pada kelompok ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi. Pendekatan yang dilakukan harus komprehensif, mulai dari edukasi, penyediaan akses layanan kontrasepsi yang beragam, hingga pendampingan berkelanjutan.

- Pasangan Usia Subur (PUS) Aktif: Kelompok ini meliputi pasangan yang sedang dalam usia reproduksi dan telah atau sedang menggunakan metode kontrasepsi. Prioritas kami adalah mempertahankan kepesertaan aktif mereka dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Ini termasuk memastikan ketersediaan metode kontrasepsi pilihan, penanganan efek samping, serta konseling berkelanjutan agar penggunaan kontrasepsi tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan reproduksi mereka.
- Pasangan Usia Subur (PUS) Baru/Potensial: Kelompok ini mencakup pasangan yang baru menikah atau pasangan yang belum menggunakan metode kontrasepsi. Fokus utama kami adalah memberikan edukasi dan promosi metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan preferensi mereka. Edukasi ini juga mencakup pentingnya penjarangan kelahiran dan pembatasan jumlah anak untuk kesehatan ibu, anak, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

2. Remaja dan Pemuda

Remaja dan pemuda adalah aset masa depan bangsa yang perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan memadai mengenai kesehatan

reproduksi dan perencanaan kehidupan. Intervensi pada kelompok ini sangat penting untuk mencegah permasalahan seperti pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, penularan IMS (Infeksi Menular Seksual), dan penyalahgunaan NAPZA. Program yang relevan harus disajikan dengan cara yang menarik dan mudah diakses oleh mereka.

- Remaja Putra dan Putri Usia Sekolah (SMP/SMA/SMK): Kelompok ini menjadi sasaran utama untuk pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif. Materi yang disampaikan meliputi pencegahan pernikahan dini, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, serta bahaya seks bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Program ini dapat diintegrasikan melalui kurikulum sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman mereka.
- Remaja dan Pemuda Usia Non-Sekolah: Kelompok ini menjadi sasaran program PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) atau sejenisnya. Tujuannya adalah memberikan informasi dan konseling sebaya tentang kesehatan reproduksi, life skills, perencanaan masa depan, dan pengembangan diri. Pendekatan dapat melalui komunitas, organisasi kepemudaan, atau pusat kegiatan masyarakat agar lebih mudah dijangkau.

3. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi pembangunan. Program pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga secara holistik, mulai dari pengasuhan anak, pembinaan remaja, hingga pemberdayaan lansia. Pendekatan yang dilakukan harus memperhatikan siklus hidup keluarga dan tantangan spesifik yang dihadapi di setiap tahapan.

- Keluarga dengan Balita dan Anak-anak: Sasaran ini difokuskan pada program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Anak (BKA). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pengasuhan, stimulasi

tumbuh kembang anak secara optimal melalui gizi yang baik dan stimulasi dini, serta pemenuhan hak-hak anak agar tumbuh sehat, cerdas, dan ceria.

- Keluarga dengan Remaja: Kelompok ini menjadi sasaran program Bina Keluarga Remaja (BKR). Tujuan utamanya adalah peningkatan komunikasi efektif antara orang tua dan remaja, pemahaman orang tua terhadap permasalahan remaja, serta pencegahan perilaku berisiko pada remaja. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi lingkungan yang suportif bagi tumbuh kembang remaja.
- Keluarga Lanjut Usia (Lansia): Sasaran ini diarahkan pada program Bina Keluarga Lansia (BKL). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia, baik dari aspek kesehatan fisik dan mental, serta pemberdayaan keluarga dalam merawat lansia. Harapannya, lansia dapat tetap produktif, mandiri, dan sejahtera di masa tua.

4. Tokoh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Keberhasilan program DPPKB sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, penyebar informasi, dan penggerak partisipasi masyarakat. Kemitraan yang kuat dengan kelompok ini akan memperluas jangkauan dan mempercepat pencapaian tujuan program.

- Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat: Mereka adalah mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang benar mengenai program Bangga Kencana. Peran mereka meliputi memberikan dukungan moral dan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan budaya dan keagamaan, memastikan pesan program diterima dan dipahami oleh masyarakat luas.
- Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Mereka adalah mitra kolaborasi penting dalam pelaksanaan program, advokasi kebijakan yang mendukung program, sosialisasi, serta penyediaan layanan komplementer. Kemitraan ini

memperkuat kapasitas DPPKB dalam menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

- Kader Bangsa Kencana (PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader BKR/BKB/BKL): Sebagai ujung tombak pelayanan di lini lapangan, para kader ini perlu terus ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, capacity building, dan motivasi. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.
- Mitra Kerja Lintas Sektor (instansi pusat vertikal dan SKPD lainnya) Kemitraan ini krusial untuk koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program terintegrasi yang saling mendukung. Tujuannya adalah mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan.

2.1.5 Kerja Sama Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis ini didasarkan pada prinsip sinergi dan kolaborasi antar-daerah, yang merupakan amanat penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk mengimplementasikan program kerja sama daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Landasan hukum dan pedoman bagi kerja sama ini merujuk pada Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 825/SK-BUP/HK/2024 tentang Penetapan Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai dengan 2026. Keputusan ini menjadi acuan utama dalam merancang inisiatif kerja sama yang dapat memperkuat pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kutai Kartanegara.

Inisiatif kerja sama daerah ini dirancang untuk memaksimalkan potensi sumber daya, saling melengkapi, dan memecahkan permasalahan lintas wilayah secara bersama-sama. Melalui program kerja sama yang

terstruktur, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat menjalin kemitraan yang produktif dengan berbagai daerah lain untuk meningkatkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kemitraan ini akan menjadi katalisator bagi pengendalian penduduk yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya berdampak di internal kabupaten, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas di tingkat regional.

Tabel 2.9 Daftar Kerja Sama Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	ALASAN KERJA SAMA	PROSES KERJA SAMA	PARTNER KERJA SAMA	ALASAN PEMILIHAN PARTNER	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
1	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Pengendalian dan pendistribusian kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB	Tindakan pelayanan akseptor KB MKJP (MOW dan MOP) pada masyarakat di wilayah kecamatan Loajan dan Kecamatan Sanga Sanga	Karena Pelayanan MKJP Layanan KB Jenis Medis Operatif Wanita (MOW) dan Medis Operatif Pria (MOP) hanya bisa dilakukan di Ruma	Membuat Pertemuan Sebelum Membuat Kerjasama Kita Mendatangi Rumah Sakit Mengecek beberapa Standar Pembayaran kalau sudah sesuai dg standar	Rumah Sakit Moies Samarinda	Banyaknya kasus Medis Operasional Wanita MOW dan Medis Operasional Pria yang memerlukan layanan medis yang cepat dan tepat khusus untuk warga yang	Terselenggaranya Kegiatan pelayanan akseptor KB MKJP (MOW dan MOP)	1. Capaian Target Pelayanan MOW dan MOP 2. Menurunkan Angka Resiko Tinggi Ibu Hamil	2024-2025	KSDPK	Penyediaan Dana APBD Untuk Kegiatan MOW dan MOP

NO	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	ALASAN KERJA SAMA	PROSES KERJA SAMA	PARTNER KERJA SAMA	ALASAN PEMILIHAN PARTNER	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/OUTCOME	TAHUN OELAKSANAAN	JENIS KERJASAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
				h Sakit	Inacebe gis		berada di Samari nda					
			Tindakan pelayanan akseptor KB MKJP (MOW dan MOP) pada masyarakat di wilayah kecamatan Marangkayu	Karena Pelayanan MKJP Layanan KB Jenis Medis Operatif Wanita (MOW) dan Medis Operatif Pria (MOP) hanya bisa dilakukan di Ruma	Membuat Pertemuan Sebelum Membuat Kerjasama Kita Mendatangi Rumah Sakit Mengecek beberapa Standar Pembayaran kalau sudah sesuai dg	Rumah Sakit Taman Husada Bontang	Banyaknya kasus Medis Operasional Wanita MOW dan Medis Operasional Pria yang memerlukan layanan medis yang cepat dan tepat khusus untuk warga	Terselenggaranya Kegiatan pelayanan akseptor KB MKJP (MOW dan MOP)	1. Capaian Target Pelayanan MOW dan MOP 2. Menurunkan Angka Resiko Tinggi Ibu Hamil	2024-2025	KSDPK	Penyediaan Dana APBD Untuk Kegiatan MOW dan MOP

NO	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	ALASAN KERJASAMA	PROSES KERJASAMA	PARTNER KERJASAMA	ALASAN PEMILIHAN PARTNER	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN	JENIS KERJASAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
				h Sakit	standar Inacebe gis		yang berada di Bontang					

-

-

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan hasil dari analisis strategis terhadap berbagai aspek pelayanan dan pelaksanaan program kerja selama lima tahun mendatang. Analisis ini didasarkan pada dokumen-dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra) Dinas, kebijakan nasional melalui Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Melalui pendekatan ini, Dinas dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pelayanan, baik dari segi internal seperti kapasitas sumber daya manusia dan anggaran, maupun eksternal seperti dukungan stakeholder dan dinamika sosial masyarakat. Identifikasi ini bertujuan untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2.2.1.1 Tantangan

Berdasarkan analisis capaiannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kinerja pelayanan. Tantangan-tantangan ini meliputi:

Tabel 2.9 Tantangan yang dihadapi DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Tantangan	Keterangan
1	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Jumlah tenaga penyuluh lapangan KB (PLKB) tidak merata di seluruh kecamatan.
		Kebutuhan peningkatan kompetensi SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan berbasis digital.

No	Tantangan	Keterangan
2	Kesenjangan Akses Layanan	Wilayah geografis yang luas dan sulit dijangkau membatasi cakupan layanan KB, terutama di daerah terpencil.
		Keterbatasan infrastruktur transportasi dan kendaraan operasional untuk mendukung penyuluhan.
3	Partisipasi Stakeholder Rendah	Keterlibatan stakeholder dalam mendukung Program BANGGA KENCANA belum mencapai target optimal.
		Minimnya kolaborasi lintas sektor dengan lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan LSM.
4	Perubahan Sosial dan Budaya	Perubahan pola pikir masyarakat terkait pentingnya program KB memerlukan pendekatan sosialisasi inovatif.
		Masih adanya persepsi negatif atau minim kesadaran tentang manfaat KB di beberapa komunitas.
5	Tuntutan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan nilai SAKIP memerlukan pengelolaan kinerja yang lebih akuntabel dan berbasis bukti.
		Tantangan dalam pengelolaan data untuk mendukung evaluasi kinerja tahunan.

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

Tabel diatas merupakan tantangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan wawasan mendalam tentang hambatan yang menghalangi pencapaian efektivitas program keluarga berencana. Menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang signifikan, terutama kurangnya tenaga penyuluh lapangan KB, dinas ini dihadapkan pada tantangan signifikan dalam menyediakan pelayanan yang merata dan efektif di wilayah yang geografisnya luas dan terpencil. Selain itu, keterbatasan ini diperparah dengan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam menggunakan teknologi informasi untuk layanan digital, suatu keharusan di era modern ini untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas layanan.

Kesenjangan akses layanan menjadi tantangan lebih lanjut yang dihadapi dinas, dengan wilayah yang luas dan sulit dijangkau menyebabkan distribusi layanan yang tidak merata. Infrastruktur transportasi yang tidak

memadai menambah kompleksitas logistik, membuat pengiriman layanan menjadi kurang efisien dan sering kali terhambat.

Rendahnya partisipasi stakeholder juga menunjukkan bahwa ada kesulitan dalam mengintegrasikan program BANGGA KENCANA dengan sektor lain. Kurangnya kolaborasi dengan lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan LSM menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif yang dapat memfasilitasi sinergi yang lebih besar dan mendukung pencapaian tujuan program secara lebih luas.

Perubahan sosial dan budaya yang lambat dalam menerima dan mengadopsi prinsip-prinsip program KB menunjukkan tantangan yang lebih dalam dari sekadar implementasi teknis. Persepsi masyarakat yang masih memegang tradisi lama dan minimnya kesadaran tentang manfaat program KB memerlukan pendekatan sosialisasi yang lebih inovatif dan mungkin lebih personal untuk mengubah mindset dan meningkatkan penerimaan terhadap program KB.

Mengenai pengelolaan keuangan, keterbatasan anggaran dan tantangan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran secara efisien menjadi sorotan. Ini menuntut peningkatan dalam perencanaan anggaran yang lebih strategis serta pengelolaan yang akuntabel untuk memastikan dana digunakan seefisien mungkin.

Akhirnya, peningkatan akuntabilitas kinerja menuntut perbaikan dalam cara dinas mengelola dan melaporkan kinerjanya. Tantangan dalam pengelolaan data untuk evaluasi kinerja tahunan menunjukkan kebutuhan untuk sistem informasi yang lebih baik dan kapasitas analisis yang lebih kuat, sehingga setiap keputusan dapat didukung oleh data yang akurat dan relevan.

Menangani tantangan-tantangan ini akan membutuhkan pendekatan multi-faset yang tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas internal tetapi juga pada pengembangan kerja sama eksternal, inovasi dalam penyampaian layanan, dan peningkatan tata kelola yang transparan dan

akuntabel. Penguatan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program keluarga berencana tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang dari upaya pembangunan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera di Kabupaten Kutai Kartanegara..

2.2.1.2 Peluang

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya:

Tabel 2.10 Peluang yang dapat dimanfaatkan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Peluang	Keterangan
1	Dukungan Kebijakan Nasional	Prioritas nasional melalui Program BANGGA KENCANA membuka peluang pendanaan tambahan, seperti DAK.
		Sinergi kebijakan dengan program pengentasan stunting dan kesehatan reproduksi meningkatkan relevansi program.
2	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap manfaat KB dan pembangunan keluarga.
		Kampung KB aktif dapat dikembangkan sebagai pusat edukasi dan layanan berbasis komunitas.
3	Pemanfaatan Teknologi Digital	Teknologi digital dapat digunakan untuk monitoring program KB secara real-time dan efisien.
		Penyuluhan berbasis media sosial dan aplikasi mobile dapat menjangkau generasi muda lebih efektif.
4	Kemitraan dengan Sektor Swasta	Kolaborasi dengan sektor swasta, LSM, dan organisasi masyarakat mendukung pembiayaan dan implementasi program.
		Kemitraan ini juga dapat memperluas jangkauan layanan ke wilayah yang sulit diakses.
5	Penguatan Kapasitas Internal	Peluang peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berbasis teknologi dan manajemen program.
		Optimalisasi sarana dan prasarana mendukung efisiensi pelayanan di lapangan.

Sumber: Data diolah, Tahun 2024

Tabel 2.10 diatas menyoroti peluang yang dapat dimanfaatkan oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan keberhasilan dan efektivitas program keluarga berencana. Berikut adalah analisis lebih mendalam mengenai setiap peluang yang teridentifikasi:

1. Dukungan Kebijakan Nasional: Peluang ini muncul dari prioritas nasional melalui Program BANGGA KENCANA yang memberikan dukungan finansial tambahan seperti DAK. Sinergi kebijakan ini dengan program kesehatan reproduksi dan pengentasan stunting dapat memperkuat basis pendanaan dan legitimasi program, meningkatkan kesempatan untuk implementasi yang lebih luas dan efektif.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap manfaat KB dan pembangunan keluarga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk adopsi program KB. Pengembangan kampung KB sebagai pusat edukasi dan layanan membuka peluang untuk pendekatan yang lebih terintegrasi dan masyarakat yang lebih terlibat.
3. Pemanfaatan Teknologi Digital: Teknologi digital menawarkan peluang besar dalam monitoring dan evaluasi program KB secara real-time, membuat proses menjadi lebih transparan dan akuntable. Selain itu, penggunaan media sosial dan aplikasi mobile untuk penyuluhan memberikan cara yang efektif dan efisien untuk menjangkau komunitas yang lebih luas dan lebih sering.
4. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Kolaborasi dengan sektor swasta, LSM, dan organisasi masyarakat meningkatkan sumber daya dan inovasi yang tersedia untuk program. Kemitraan ini juga memungkinkan penyebaran layanan KB ke wilayah yang sulit dijangkau, meningkatkan cakupan dan efektivitas program.
5. Penguatan Kapasitas Internal: Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berbasis teknologi dan manajemen program adalah kunci untuk optimalisasi layanan. Penguatan ini tidak hanya meliputi

peningkatan keterampilan teknis tapi juga pengelolaan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung efisiensi operasional.

Keseluruhan peluang ini, jika diintegrasikan dan dikelola dengan strategis, bisa sangat meningkatkan kapasitas DPPKB untuk melaksanakan program yang lebih berhasil dan berkelanjutan. Kunci dari keberhasilan ini terletak pada implementasi yang efisien dan berkelanjutan dari strategi yang merespons baik peluang internal maupun eksternal yang ada.

Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang ini, Dinas PPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan pelayanan dan program kerja. Analisis ini menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan kinerja pelayanan perangkat daerah dalam jangka panjang.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada berbagai permasalahan yang berkembang baik di lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan ini memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas, yang memengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, sumber daya yang tersedia harus dikelola secara optimal guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berbagai program kerja telah menghasilkan capaian yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatnya kesadaran akan pentingnya keluarga berencana, penguatan peran Kampung KB, dan perluasan akses layanan kontrasepsi. Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang masih membutuhkan perhatian dan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan, seperti kesenjangan akses layanan di wilayah terpencil, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, serta rendahnya partisipasi stakeholder dalam mendukung program strategis. Upaya penguatan

kolaborasi lintas sektor, optimalisasi anggaran, dan inovasi layanan berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan ini.

Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok (RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029)	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	Belum ada Edaran/Himbauan terkait dengan Sekolah Siaga Kependudukan	Sekolah belum memahami terkait dengan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)
		Belum tersusunnya Peraturan Bupati sebagai pengesahan pemanfaatan dokumen GDPK	Belum ditetapkannya Peraturan Daerah pemanfaatan GDPK
		Belum adanya pemahaman stakeholder terkait pemanfaatan GDPK	Stakeholder belum memahami manfaat GDPK
		Data SIGA tidak terupdate secara berkala	Kurangnya pemahaman Kader dan Operator dalam melakukan penginputan data SIGA (Sistem Informasi Keluarga)
2	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana (KB)	Belum optimalnya tugas peran kader PPKBD (Sub PPKBD)	Operasional Kader PPKBD (Sub PPKBD) masih rendah
		Dropping Alokon tidak sesuai dengan kebutuhan	Tidak semua Faskes melaporkan pelayanan KB
		Keterbatasan ketersediaan alat penunjang layanan KB	Tidak semua Faskes memiliki alat IUD Kit, Implan Kit, dan Meja Ginekologi yang terbaru

No	Masalah Pokok (RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029)	Masalah	Akar Masalah
		Terbatasnya SDM PKB dan PLKB	Tidak adanya penambahan (rekrutmen) tenaga
		Kapasitas PKB atau PLKB yang relatif kurang	Beberapa petugas PKB dan PLKB yang kompeten sudah pensiun: PNS 4 orang, P3K 44 orang, THL 6 orang
		Belum optimalnya kader dalam pemahaman tentang kelompok ketahanan keluarga	Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kader kelompok ketahanan keluarga
		Metode penyampaian pesan/KIE yang monoton	Tidak adanya inovasi yang dikembangkan
		Kurangnya media pendukung dalam penyampaian KIE	Media pendukung KIE tidak diupdate secara rutin
		Tidak adanya insentif dan operasional untuk kader kelompok ketahanan keluarga	Tidak atau belum diusulkannya insentif dan operasional bagi kader kelompok ketahanan keluarga
		Tidak optimalnya peningkatan kualitas produk UPPKA	Kurangnya pembinaan berkala dan peningkatan kapasitas kader dalam peningkatan mutu produk

Sumber: Data diolah, Tahun 2024

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi sejumlah Pokok Masalah yang dapat dipetakan dalam masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

1) Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk dihadapkan pada tantangan terkait pemanfaatan data kependudukan dan rendahnya kerja sama stakeholder dalam program Bangga Kencana. Hal ini terlihat dari belum adanya Edaran/Himbauan terkait Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) serta belum tersusunnya regulasi berupa Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai dasar pemanfaatan dokumen GDPK. Selain itu, rendahnya pemahaman stakeholder terkait manfaat GDPK dan tidak terupdatenya data SIGA secara berkala, akibat kurangnya pemahaman kader dan operator, menjadi hambatan utama. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan data kependudukan.

2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang ini menghadapi permasalahan dengan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang ada di kelompok kegiatan (Poktan), baik poktan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh PKB/PLKB sebagai pembina wilayah yang bersumber pada keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu juga karena kapasitas kader poktan yang terbatas (menjadi kader di beberapa poktan serta kegiatan di kelembagaan lainnya). Metode penyampaian KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang monoton serta kurangnya inovasi dalam pembaruan media pendukung turut memperlemah efektivitas program. Solusi yang dibutuhkan meliputi ; penambahan tenaga PKB/PLKB dengan kuantitas serta kualitas sesuai yang dibutuhkan. Tersedianya insentif untuk kader poktan juga diharapkan bisa menjadi motivasi untuk meningkatnya optimalisasi pelaksanaan kegiatan operasional di masing-masing poktan. Untuk penyempurnaan kegiatan juga sangat diperlukan peningkatan kapasitas kader pelaksana dan

pengelola sebagai dukungan dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan operasional yang inovatif serta metode yang variatif.

3) Bidang Keluarga Berencana

Permasalahan utama di Bidang Keluarga Berencana adalah terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM PKB/PLKB. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rekrutmen tenaga baru untuk menggantikan petugas yang pensiun, sehingga rasio antara jumlah PKB/PLKB dan wilayah binaan tidak seimbang. Selain itu, keterbatasan alat penunjang layanan KB, seperti IUD Kit, Implan Kit, dan Meja Ginekologi yang belum tersedia secara merata di fasilitas kesehatan, turut menghambat optimalisasi layanan program KB. Solusi yang diperlukan mencakup rekrutmen tenaga baru PKB/PLKB, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan KB di fasilitas kesehatan.

Permasalahan kedua adalah rendahnya kapasitas kader IMP dan kurangnya dukungan operasional kader IMP.

Permasalahan di ketiga bidang, yakni Pengendalian Penduduk, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Keluarga Berencana, saling berkaitan dan berpusat pada rendahnya kapasitas SDM, kurangnya dukungan regulasi dan operasional, serta terbatasnya inovasi dan sarana pendukung. Diperlukan pendekatan terpadu dan strategis melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi, inovasi metode komunikasi, serta optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung efektivitas program secara berkelanjutan.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan data yang telah diidentifikasi dan dilakukan analisis, berikut adalah penentuan isu-isu strategis yang mencakup aspek Tata Kelola, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Dukungan Operasional. Isu-isu ini

menjadi prioritas utama dalam perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.12 Penentuan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana	Geopolitik dan Geoekonomi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tata Kelola Program dan Regulasi
			Geopolitik dan Geoekonomi	Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	Pengembangan Kemiskinan dan Kesenjangan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Pengendalian Penduduk dan Pelayanan KB
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi
	Industri 5.0		Potensi Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas dan	Peningkatan Kapasitas SDM	
	Rendahnya pemahaman					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	masyarakat tentang Keluarga Berencana (KB)			a Dan Modal Manusia	Daya Saing SDM	dan Kader
			Geopolitik Dan Geoekonomi	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Dukungan Operasional

1) Tata Kelola Program dan Regulasi

Penentuan isu-isu strategis ini mengacu pada permasalahan utama, akar masalah, dan telaahan regulasi yang telah dikaji. DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara harus memprioritaskan langkah-langkah strategis di bidang tata kelola program, pengendalian penduduk, pelayanan KB, peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan data, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan yang terintegrasi dan sinergis dengan pemangku kepentingan lain akan memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif dan mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga yang optimal serta mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas, mandiri, dan sejahtera.

2) Pengendalian Penduduk dan Pelayanan KB

Salah satu isu strategis utama yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) adalah pengendalian

penduduk dan pelayanan keluarga berencana (KB). Permasalahan yang teridentifikasi mencakup ketidaksesuaian dropping alat kontrasepsi (Alokon) dengan kebutuhan lapangan, kurangnya pelaporan pelayanan KB oleh fasilitas kesehatan (Faskes), serta keterbatasan alat penunjang layanan KB seperti IUD Kit, Implan Kit, dan Meja Ginekologi di beberapa wilayah. Hal ini mengakibatkan layanan kesehatan reproduksi dan program KB tidak berjalan secara optimal di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai strategi penyelesaian, DPPKB perlu melakukan optimalisasi distribusi Alokon berbasis data kebutuhan aktual, memperkuat sistem pelaporan layanan KB oleh Faskes melalui pelatihan rutin bagi petugas, serta memastikan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas alat penunjang KB di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Pendekatan ini akan memperbaiki akses dan kualitas layanan KB, mendukung pengendalian angka kelahiran, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah kabupaten secara merata. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program KB dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target pembangunan kependudukan yang telah ditetapkan.

3) Peningkatan Kapasitas SDM dan Kader

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kader menjadi salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi terbatasnya jumlah tenaga PKB/PLKB akibat pensiunnya petugas tanpa penggantian yang memadai, kurangnya pelatihan teknis dan pembinaan berkala, serta rendahnya motivasi kader IMP dan Sub IMP serta kader Poktan akibat minimnya insentif dan fasilitas operasional. Situasi ini menyebabkan pelayanan KB dan program ketahanan keluarga tidak berjalan optimal di beberapa wilayah.

Sebagai langkah strategis, DPPKB perlu melakukan rekrutmen tenaga PKB/PLKB secara berkala, disertai pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan di lapangan. Selain itu, pemberian insentif yang memadai dan dukungan operasional yang sesuai akan memotivasi kader IMP dan Sub IMP serta kader Poktan dalam menjalankan tugas pendampingan keluarga. Dengan pembinaan terstruktur dan pelatihan berkelanjutan, DPPKB diharapkan dapat memperkuat kapasitas SDM dan memastikan program keluarga berencana serta ketahanan keluarga berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

4) Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi

Pemanfaatan data dan sistem informasi menjadi salah satu isu strategis penting yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara. Data SIGA yang tidak diperbarui secara berkala, akibat keterbatasan kemampuan kader dan operator dalam penginputan data, menjadi kendala utama yang menghambat proses perencanaan berbasis bukti (data-driven planning). Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data layanan di lapangan dan data yang tercatat dalam sistem, sehingga mempersulit pengambilan keputusan yang efektif untuk program keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Untuk mengatasi permasalahan ini, DPPKB perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis berkala tentang pengelolaan data SIGA. Selain itu, pembaruan sistem informasi secara real-time dan monitoring berkala harus dilakukan untuk menjaga akurasi dan validitas data kependudukan. Integrasi sistem data lintas sektor juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan data keluarga. Dengan pendekatan ini, DPPKB akan mampu memanfaatkan data secara optimal sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Dukungan Operasional

Pemberdayaan ekonomi keluarga dan dukungan operasional menjadi isu strategis penting yang perlu mendapat perhatian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak optimalnya peningkatan kualitas produk UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) akibat kurangnya pembinaan dan pelatihan keterampilan menjadi tantangan utama dalam menciptakan keluarga yang mandiri secara ekonomi. Selain itu, tidak adanya insentif dan dukungan operasional bagi kader kelompok ketahanan keluarga turut menurunkan motivasi dan produktivitas mereka dalam mendukung program pemberdayaan keluarga di lapangan. Kurangnya media pendukung Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang jarang diperbarui juga menghambat efektivitas kampanye pembangunan keluarga dan pemasaran produk lokal.

Untuk mengatasi permasalahan ini, DPPKB perlu mengembangkan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan berbasis potensi lokal, menyediakan akses pasar, serta membangun kemitraan dengan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing produk UPPKA. Selain itu, insentif dan dukungan operasional bagi kader harus menjadi prioritas untuk meningkatkan semangat dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas. Pembaruan media pendukung KIE secara berkala juga perlu dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi dan promosi produk keluarga binaan. Dengan strategi ini, DPPKB dapat menciptakan keluarga yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Penentuan isu-isu strategis yang diidentifikasi mencerminkan yang harus dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui strategi yang terfokus, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas SDM serta infrastruktur pendukung, DPPKB dapat mengatasi isu-isu ini

secara efektif. Pendekatan yang terintegrasi akan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis data yang akurat. Dengan demikian, tercapainya keluarga berkualitas, sejahtera, dan mandiri dapat diwujudkan melalui perencanaan yang sistematis dan eksekusi yang tepat sasaran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini disusun berdasarkan penyelesaian isu-isu strategis, dengan fokus pada mendukung visi dan misi pembangunan daerah, serta menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program prioritas DPPKB.

Tujuan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rencana Strategis 2025-2029 adalah meningkatnya pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Tujuan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari upaya menyeluruh untuk memastikan keselarasan antara jumlah penduduk dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketersediaan sumber daya pembangunan. Dengan pertumbuhan penduduk yang terencana dan terkendali, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi, meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui perencanaan kelahiran yang ideal, menurunkan angka stunting, serta mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur publik. Oleh karena itu, DPPKB akan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan Keluarga Berencana (KB), penguatan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang terintegrasi, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil bahagia dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil spesifik yang ingin dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur, realistis, dan terarah guna mencapai hasil yang sesuai dengan rencana strategis pembangunan daerah.

Sasaran yang akan dicapai oleh DPPKB dalam mencapai tujuan Renstra ada meningkatnya kesejahteraan keluarga. Sasaran ini secara spesifik berfokus pada perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat untuk secara aktif merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak. Ini mencakup peningkatan penggunaan metode kontrasepsi modern yang aman dan efektif, penurunan angka *unmet need* (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), serta peningkatan usia perkawinan pertama. Dengan mendorong setiap pasangan usia subur untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai perencanaan keluarga, DPPKB bertujuan untuk memberdayakan keluarga agar dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik, memastikan kesehatan optimal bagi ibu dan anak, dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi setiap anggota keluarga untuk berkembang.

Pencapaian sasaran ini akan direalisasikan melalui berbagai strategi, termasuk intensifikasi promosi dan edukasi mengenai manfaat Keluarga Berencana (KB) serta pentingnya dua anak cukup sebagai norma sosial. DPPKB juga akan memperluas akses layanan KB yang berkualitas dan terjangkau hingga ke pelosok wilayah, dengan melibatkan fasilitas kesehatan, kader kesehatan, dan mitra strategis lainnya. Selain itu, program-program pembangunan keluarga yang mendukung perencanaan kelahiran, seperti pembinaan remaja dan calon pengantin, akan terus diperkuat. Dengan demikian, peningkatan perencanaan kelahiran anak tidak hanya akan berkontribusi pada pengendalian penduduk secara makro, tetapi juga secara mikro akan mewujudkan keluarga-keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas.

Tujuan dan Sasaran ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, terukur, dan berdampak pada peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk, serta pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran ini dirancang untuk mencapai hasil yang nyata melalui indikator kinerja utama yang terukur. Rencana target pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KE T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera		Indeks Pembangunan Keluarga	68,10	69,20	70,20	71,20	72,10	73,00	
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	78,50	82,70	85,40	87,10	88,20	88,80	

Sumber: Sistem Informasi Keluarga dan Pendataan Keluarga (diolah), Tahun 2025

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang efektif, terarah, dan berdampak nyata. Dengan fokus pada peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sasaran yang disusun dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga kemajuan dan capaian dapat dievaluasi secara berkala. Upaya ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk melalui layanan yang lebih optimal, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, tujuan ini akan berkontribusi pada pencapaian keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Strategi ini mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar efektif dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan daerah. Sedangkan arah kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan implementasi strategi sehingga dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi dengan kebijakan nasional dan daerah.

Gambaran keterkaitan antara visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Meningkatnya perencanaan kelahiran anak	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kependudukan	Peningkatan Kualitas Basis Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA)	
			Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	
			Peningkatan Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA)	
		Meningkatkan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA)
				Peningkatan Akses dan Pelayanan KB Yang Merata dan Berkualitas
				Penguatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi BANGGA KENCANA
		Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB dan Kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD) dan Nakes		

Sumber: Data diolah, Tahun 2024

Penjelasan mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut:

1) Strategi: Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kependudukan

Strategi meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kependudukan bertujuan untuk memastikan terciptanya sinergi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di lapangan. Melalui pendekatan ini, setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat, dapat berperan aktif dan memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Koordinasi yang kuat akan mendorong efisiensi sumber daya, menghindari tumpang tindih kebijakan, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan:

a) Peningkatan Kualitas Basis Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA)

Peningkatan kualitas basis data kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA) diarahkan untuk memastikan tersedianya data yang akurat, valid, dan terbaru sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat. Melalui pemutakhiran data secara berkala, integrasi sistem informasi kependudukan dengan program KB, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, kebijakan yang dirumuskan akan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang berkualitas akan mendukung evaluasi program yang transparan, memastikan akuntabilitas, serta memperkuat perencanaan pembangunan keluarga berbasis bukti di tingkat daerah.

b) Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Pemanfaatan Grand Design ini memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, memperhitungkan aspek sosial,

ekonomi, dan lingkungan hidup, serta mengoptimalkan potensi bonus demografi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, kebijakan yang disusun dapat mendukung keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, serta menciptakan penduduk yang berkualitas dan berdaya saing.

2) Strategi: Meningkatkan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga

Strategi meningkatkan pembinaan kelompok ketahanan keluarga bertujuan untuk memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembinaan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok-kelompok ketahanan keluarga yang berfokus pada siklus kehidupan, seperti kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera (PPKS), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/Akseptor (UPPKA). Dengan pendekatan ini, diharapkan keluarga memiliki ketahanan yang kuat dalam aspek pengasuhan, ekonomi, kesehatan, dan sosial.

Arah Kebijakan:

a) Peningkatan Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA)

Peningkatan jumlah kelompok ketahanan keluarga mencakup upaya untuk memperluas jangkauan dan cakupan kelompok di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini menargetkan terbentuknya kelompok ketahanan keluarga di setiap desa atau kelurahan, sehingga lebih banyak keluarga dapat memperoleh manfaat berupa edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan spesifik siklus hidup keluarga. Kelompok seperti BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, dan UPPKA berperan penting dalam memberikan dukungan kepada keluarga dalam aspek pengasuhan anak, pembinaan remaja, kesejahteraan lansia, konseling remaja, dan peningkatan ekonomi keluarga.

b) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA)

Pengembangan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga diarahkan untuk memperkuat kualitas program melalui peningkatan kapasitas anggota kelompok, pemberian pelatihan, serta fasilitasi akses terhadap sumber daya dan informasi. Kelompok seperti BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, dan UPPKA akan dibina agar mampu menjadi wadah pemberdayaan keluarga di tingkat komunitas. Selain itu, pengembangan program ini mencakup dukungan operasional, peningkatan kualitas layanan, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya pemberdayaan ini, kelompok ketahanan keluarga diharapkan menjadi motor penggerak dalam membangun keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera.

3) Strategi: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana bertujuan untuk memastikan layanan Keluarga Berencana (KB) yang lebih merata, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas ini mencakup aspek peningkatan aksesibilitas, pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan program KB. Dengan pendekatan ini, diharapkan program KB mampu menekan angka kelahiran, mengurangi unmet need KB, dan mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga.

Arah Kebijakan:

a) Peningkatan Akses dan Pelayanan KB Yang Merata dan Berkualitas

Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas berfokus pada pemerataan layanan KB di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Upaya ini mencakup penyediaan alat dan sarana kontrasepsi yang memadai, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan seperti

Puskesmas dan Posyandu, serta layanan mobile clinic untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani. Pelayanan yang berkualitas juga ditingkatkan dengan memastikan fasilitas memiliki standar pelayanan minimal yang optimal serta menyediakan metode kontrasepsi yang lengkap, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

b) Penguatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi BANGGA KENCANA

Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) BANGGA KENCANA diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Melalui pendekatan KIE yang inovatif dan berbasis teknologi informasi, advokasi ini melibatkan berbagai media dan metode seperti sosialisasi langsung, kampanye digital, penyuluhan kelompok, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif akan manfaat KB dalam menekan angka kelahiran, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan membangun keluarga yang lebih berkualitas.

c) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB dan Kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD) dan Nakes

Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB, petugas lapangan KB, dan kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) serta tenaga kesehatan (Nakes) diarahkan pada penguatan kapasitas SDM sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB di lapangan. Upaya ini mencakup rekrutmen tenaga baru, pelatihan berkala, serta peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis bagi tenaga penyuluh KB dan kader. Selain itu, kolaborasi dengan tenaga kesehatan (Nakes) akan memastikan pelayanan KB berjalan optimal, profesional, dan sesuai standar pelayanan. Dengan dukungan SDM yang kompeten, pelaksanaan program KB akan lebih efektif dalam menjangkau keluarga dan komunitas.

4) Strategi: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Strategi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memenuhi harapan, kebutuhan, dan kepuasan masyarakat. Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan, melalui pendekatan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Arah Kebijakan:

a) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan diarahkan pada upaya peningkatan mutu pelayanan administrasi, program Keluarga Berencana (KB), dan pengelolaan data kependudukan. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan prosedur layanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses. Selain itu, evaluasi kepuasan masyarakat secara berkala melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan menjadi tolok ukur untuk memastikan perbaikan dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, DPPKB diharapkan mampu menciptakan layanan yang berkualitas, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sehingga kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dapat tercapai secara optimal.

Strategi dan arah kebijakan yang telah disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program yang terarah, efektif, dan berkelanjutan dalam menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Melalui peningkatan koordinasi, pembinaan kelompok ketahanan keluarga, pelayanan keluarga berencana, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan, langkah-langkah konkret ini dirancang untuk memberikan dampak yang nyata dan positif bagi masyarakat. Dengan sinergi antara pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi informasi, serta

peningkatan kapasitas SDM, diharapkan seluruh program dapat berjalan optimal untuk mendukung terciptanya keluarga yang berkualitas, pelayanan publik yang prima, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 3.3 Pemetaan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia	Peningkatan Kualitas Basis Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA)	
2			Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Kependudukan	
3			Peningkatan Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA)	
4			Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA)	
5			Peningkatan Akses dan Pelayanan KB Yang Merata dan Berkualitas	
6			Penguatan Advokasi dan	

			Komunikasi Informasi dan Edukasi BANGGA KENCANA	
7			Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB dan Kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD) dan Nakes	

3.4 Pentahapan Renstra

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan dilaksanakan melalui pentahapan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pentahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	2026	2027	2028	2029	2030
Pentahapan RPJMD	Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Wilayah dan Penataan Kelembagaan	Ekspansi Pembangunan berbasis Kewilayahan untuk Transformasi Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Tata Kelola	Peningkatan Pembangunan Fondasi Transformasi Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Tata Kelola	Perwujudan KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Fondasi Menuju Akselerasi Pembangunan
Pentahapan Renstra	Penguatan Kelembagaan Pendukung Pembangunan Keluarga	Pengembangan Pelayanan Pembangunan Keluarga Berbasis Kewilayahan	Peningkatan Pembangunan Keluarga sebagai Fondasi Transformasi Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Tata Kelola	Mewujudkan Keluarga Kutai Kartanegara sebagai IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Kualitas Pembangunan Keluarga
Bidang:					
Pengendalian Penduduk	Penguatan Keberfungsian Rumah Dataku	Penguatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Peningkatan Kualitas dan Interoperabilitas Data Kependudukan	Peningkatan Intervensi Program Pengendalian Penduduk	Pemantapan Kebijakan Berbasis Data Kependudukan
Keluarga Berencana	Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas dan Penyediaan	Peningkatan Cakupan Pelayanan KB Metode MKJP di Seluruh Wilayah	Pengembangan Program Edukasi Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga	Peningkatan Kolaborasi dengan Stakeholders Pentahelix untuk Memperluas	Pemantapan Keluarga Berkualitas

	2026	2027	2028	2029	2030
	Sarana dan Prasarana Penunjang KB yang Memadai		Berencana Bagi Remaja Dan Pasangan Usia Subur.	Jangkauan Pelayanan KB	
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penguatan kelembagaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di tingkat desa/kelurahan	Peningkatan cakupan layanan konseling keluarga untuk mengatasi permasalahan domestik.	Peningkatan kapasitas dan peran sentra informasi dan konseling remaja (PIK-R) untuk edukasi kesehatan reproduksi.	Peningkatan kolaborasi dengan lembaga sosial dan komunitas untuk program pencegahan stunting dan kekerasan dalam rumah tangga.	Pemantapan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah yang dituangkan melalui tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan perlu didukung dengan program dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan - kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program yang telah ditentukan.

4.1 Program Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang terukur dan terarah mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang ada dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program urusan dan program penunjang urusan. Program urusan berfungsi untuk mencapai tujuan dinas yang telah sinergikan dengan tujuan daerah sedangkan program penunjang urusan adalah program kesekretariatan yang berfungsi untuk melayani rumah tangga dalam rangka menunjang tujuan dinas.

Dalam rangka menyusun program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatkan pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera				Indeks Pembangunan Keluarga		
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya pepaduan dan sinkronisasi program bangga kencana	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam program bangga kencana	Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
				Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
			Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	
			Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	
				Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
				Terlaksananya Pemetaan pengendalian penduduk	Persentasi Stekhokder yang menggunakan data keluarga dan kependudukan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
				Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
				Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
				Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
			Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serat masyarakat	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
			dalam pembinaan keluarga berencana				
					Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		
					Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri		

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
				Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Peningkatan Kesertaan KB Pria	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terfasilitasinya Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
			Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serot masyarakat dalam		Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
			mewujudkan keluarga sejahtera				
					Indeks Pengasuhan Remaja		
					Indeks Lansia Berdaya		
						Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	

			<p>Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</p>	<p>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk</p>	<p>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
						Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

			<p>Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
						Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	
				Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	
						Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	

NSPK DAN SASA RAN YANG RE LEVAN	TUJUAN	SASARA N	OUTCO ME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	
				Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	
			Meningkatkannya akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersusunnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGENDAL IAN PENDUDUK	Terkendali nya pertambah an jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,2 0	2,1 9		2,1 9	900.0 00.00 0,00	2,1 8		2,1 8		2,1 7		2,1 7	
		2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASF R 15-19)	25, 80	25, 40		25, 00		24, 60		24, 30		23, 90		23, 60	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah	terlaksana nya pemaduan dan sinkronisa si program bangga kencana	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisa si program Bangga Kencana				290.0 00.00 0,00		900.0 00.00 0,00		900.0 00.00 0,00		1.250. 000.0 00,00		1.900. 000.0 00,00	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalia n Kuantitas Penduduk															
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal/Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal/Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal/Kabupaten/Kota		219 Dokumen	41.79 0.000, 00	-		0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00
Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur		1 Keg iata n	33.57 5.600, 00	0,0 0		0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	kan Jalur Pendidikan Nonformal	Pendidikan Nonformal													
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Tersedianya Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		1 Dokumen	55.44 5.400,00	0,0 0		0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian		12 Kegiatan	17.26 6.680,00	12 Kegiatan	40.00 0.000,00	12 Kegiatan	100.0 00.00 0,00	12 Kegiatan	125.0 00.00 0,00	12 Kegiatan	150.0 00.00 0,00	12 Kegiatan	200.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bangga Kencana	Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana)	Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana)													
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependuduk an Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Terlaksana nya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaa n Pendidikan Kependudu kan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatk an Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaa n Pendidikan Kependudu kan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal		-	0,00	15 Sat uan Pen didi kan	50.00 0.000, 00	20 Sat ua n Pen didi ka n	100.0 00.00 0,00	20 Sat ua n Pen didi ka n	125.0 00.00 0,00	20 Sat ua n Pen didi ka n	150.0 00.00 0,00	20 Sat ua n Pen didi ka n	200.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan Informal	SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													
Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependuduk an Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependuduk an kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksana nya Advokasi tentang Pemanfaat an Kajian Dampak Kependudu kan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudu kan kepada Pemangku Kepentinga n	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaat an Kajian Dampak Kependudu kan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudu kan kepada Pemangku Kepentinga n		-	0,00	1 Lap ora n	50.00 0.000, 00	1 Lap ora n	75.00 0.000, 00	1 Lap ora n	75.00 0.000, 00	1 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	200.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependuduk an Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependuduk an kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksana nya Sosialisasi tentang Pemanfaat an Kajian Dampak Kependudu kan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudu kan kepada Pemangku Kepentinga n	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaat an Kajian Dampak Kependudu kan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudu kan kepada Pemangku Kepentinga n		-	0,00	1 Lap ora n	150.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	200.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	225.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	250.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	300.0 00.00 0,00
Penyediaan dan Pengembang an Materi Pendidikan	Terlaksana nya Penyediaan dan Pengemban	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengemba		-	0,00	3 Dok um en	50.00 0.000, 00	3 Do ku me n	100.0 00.00 0,00	3 Do ku me n	150.0 00.00 0,00	3 Do ku me n	200.0 00.00 0,00	3 Do ku me n	250.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kependuduk an Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota	gan Materi Pendidikan Kependudu kan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Sesuai Isu Lokal Kabupaten /Kota	ngan Materi Pendidikan Kependudu kan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten /Kota													
Penyediaan dan Pengembang an Materi Pendidikan Kependuduk an Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota	Terlaksana nya Penyediaan dan Pengembang an Materi Pendidikan Kependudu kan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembang an Materi Pendidikan Kependudu kan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal		-	0,00	3 Dok umen	50.00 0.000, 00	3 Do ku men	100.0 00.00 0,00	3 Do ku men	150.0 00.00 0,00	3 Do ku men	200.0 00.00 0,00	3 Do ku men	250.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kabupaten /Kota	Kabupaten /Kota													
Pemetaan Perkiraan Pengendalia n Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksan anya Pemetaan pengendali an penduduk	Persentasi Stekhhokde r yang mengguna kan data keluarga dan kependud ukan		0,4 5		0,5 0	610.0 00.00 0,00	0,5 5		0,6 0		0,6 5		0,6 7	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependuduk an	Tersediany a Data Kependudu kan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolaha n Data Kependudu kan		1 Dok um en	25.68 7.000, 00	-		0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksana nya Pembinaan dan Pengawasa n Penyelengg araan Sistym Informasi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasa n Penyelengg araan Sistem Informasi Keluarga		1 Lap ora n	61.27 0.000, 00	0,0 0		1 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	125.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	200.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	250.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Keluarga (SIGA)														
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhira n Data Keluarga	Terlaksana nya Pemanfaat an Data Hasil Pemutakhi ran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhi ran Data Keluarga yang Dimanfaat kan		0,0 0	0,00	1 Dok um en	50.00 0.000, 00	1 Do ku me n	100.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	125.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	150.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	200.0 00.00 0,00
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersediany a Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersediany a		3 Dok um en	69.45 6.300, 00	1 Dok um en	50.00 0.000, 00	1 Do ku me n	200.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	225.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	300.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	400.0 00.00 0,00
Pencatatan dan Pengumpula n Data Keluarga	Terlaksana nya Pencatatan dan Pengumpul an Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpul an Data Keluarga		23 Lap ora n	415.5 04.60 0,00	1 Lap ora n	150.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	500.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	500.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	650.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	750.0 00.00 0,00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalia n Lapangan	Terlaksana nya Pengolaha n dan Pelaporan Data	Jumlah Dokumen Pengolaha n dan Pelaporan Data		20 Dok um en	200.4 90.00 0,00	0,0 0		1 Do ku me n	200.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	250.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	350.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	450.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dan Pelayanan KB	Pengendali an Lapangan dan Pelayanan KB	Pengendali an Lapangan dan Pelayanan KB													
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Terlaksana nya Pembinaan dan Pengawasa n Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaa n Pembinaan dan pengawasa n Program Bangga Kencana		2 Lap ora n	1.683. 282.0 00,00	1 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	1 Lap ora n	1.251. 000.0 00,00	1 Lap ora n	1.426. 944.0 17,33	1 Lap ora n	1.722. 404.3 72,00	1 Lap ora n	2.074. 928.3 18,99
Penyusunan Profil program Pembanguna n Keluarga,	Terlaksana nya Dokumen Profil Kependudu kan,	Jumlah Dokumen Profil Kependudu kan,		1 Dok lum en	64.25 7.800, 00	0,0 0		0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kependuduk an, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	kan, Keluarga Berencana dan Pembangu nan Keluarga	Keluarga Berencana dan Pembangu nan Keluarga													
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependuduk an, Keluarga Berencana dan Pembanguna n Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Terlaksana nya Penyediaan dan Pengolaha n Data Kependudu kan, Keluarga Berencana dan Pembangu nan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolaha n Data Kependudu kan, Kleuarga Berencana dan Pembangu nan Keluarga (Bangga Kencana) mellalui Sistem Informasi Keluarga		0,0 0	0,00	1 Dok um en	50.00 0.000, 00	1 Do ku me n	150.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	150.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	175.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	225.0 00.00 0,00
Pembentuka n dan operasionalis	Dibentukn ya Rumah Data	Jumlah Rumah Data		0,0 0	0,00	15 Uni t	60.00 0.000, 00	20 Uni t	150.0 00.00 0,00	20 Uni t	175.0 00.00 0,00	20 Uni t	225.0 00.00 0,00	20 Uni t	275.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
asi Rumah Data Kependuduk an di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kependudu kan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperku at Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Kependudu kan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperku at Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk													
Penyusunan Profil program Pembanguna n Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana	Terlaksana nya Penyusuna n profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudu kan, Keluarga Berencana dan Pembangu		0,0 0	0,00	1 Dok umen	50.00 0.000, 00	1 Do ku me n	100.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	100.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	125.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	175.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(Bangga Kencana)	provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusuna n profil Pengendali an Penduduk dan KB)	nan Keluarga													
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCAN A (KB)	Meningkat nya pemberda yaan dan peran serta masyaraka t dalam pembinaa n Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	80, 20	80, 30		80, 30	2.915. 000.0 00,00	80, 30		80, 30		80, 40		80, 40	
		Persentase Kehamilan Tidak Direncana kan (KTD)	14, 70	12, 30		10, 70		9,6 0		8,9 0		8,4 0		8,1 0	
		Persentase Kampung Keluarga Berkualita	0,9 0	2,1 0		4,7 0		10, 40		23, 10		30, 00		30, 00	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		s yang Mandiri													
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalia n Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							915.0 00.00 0,00								
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Terkelolany a Operasiona l dan Sarana di Balai Operasiona l dan Sarana di Balai Penyuluha n Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaa n Operasiona l dan Sarana di Balai Penyuluha n Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan		18 Lap ora n	341.9 46.00 0,00	0,0 0		20 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	20 Lap ora n	200.0 00.00 0,00	20 Lap ora n	200.0 00.00 0,00	20 Lap ora n	200.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Keluarga Berencana)	Kependudukan, dan Keluarga Berencana)													
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		1 lap ora n	332.7 54.00 0,00	1 lap ora n	400.0 00.00 0,00	1 lap ora n	200.0 00.00 0,00	1 lap ora n	200.0 00.00 0,00	1 lap ora n	200.0 00.00 0,00	1 lap ora n	200.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		6 dok um en	109.2 22.12 9,00	5 Dok um en	75.00 0.000, 00	5 Do ku me n	150.0 00.00 0,00	5 Do ku me n	150.0 00.00 0,00	5 Do ku me n	300.0 00.00 0,00	5 Do ku me n	300.0 00.00 0,00
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa		21 dok um en	1.746. 427.8 00,00	5 Dok um en	100.0 00.00 0,00	5 Do ku me n	250.0 00.00 0,00	5 Do ku me n	250.0 00.00 0,00	5 Do ku me n	250.0 00.00 0,00	5 Do ku me n	250.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Budaya Lokal	Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanak an													
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksana nya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholde	Jumlah Organisasi yang Mendapatk an Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholde		6 org ani sasi	144.9 04.50 0,00	5 Org ani sasi	340.0 00.00 0,00	5 Org ani sas i	200.0 00.00 0,00	5 Org ani sas i	200.0 00.00 0,00	5 Org ani sas i	200.0 00.00 0,00	5 Org ani sas i	200.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	rs dan Mitra Kerja	kepada Stakeholde rs dan Mitra Kerja													
Pendayagun aan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							115.0 00.00 0,00								
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksana nya Penggeraka n Kader Institusi Masyaraka t Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggeraka n Kader Institusi Masyaraka t Pedesaan (IMP)		237 ora ng	656.5 80.00 0,00	237 ora ng	10.00 0.000, 00	23 7 ora ng	476.4 26.23 1,88	23 7 ora ng	500.0 00.00 0,00	23 7 ora ng	700.0 00.00 0,00	23 7 ora ng	900.0 00.00 0,00
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksana nya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga,	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangu nan		1 org ani sasi	0,00	1 org ani sasi	30.00 0.000, 00	10 org ani sas i	250.0 00.00 0,00	20 org ani sas i	250.0 00.00 0,00	20 org ani sas i	400.0 00.00 0,00	20 org ani sas i	600.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	nan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependu-	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependu-		1 lap ora n	0,00	1 lap ora n	75.00 0.000, 00	1 lap ora n	150.0 00.00 0,00	1 lap ora n	200.0 00.00 0,00	1 lap ora n	200.0 00.00 0,00	1 lap ora n	250.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	kan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kependudu kan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLK B)													
Pengendalia n dan Pendistribus ian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota							1.235. 000.0 00,00								

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		268 9 Orang	942.8 84.00 0,00	268 9 Orang	10.00 0.000, 00	26 89 Orang	200.0 00.00 0,00	27 00 Orang	300.0 00.00 0,00	28 00 Orang	700.0 00.00 0,00	29 00 Orang	1.000. 000.0 00,00
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		Unit	0,00	1 unit	900.0 00.00 0,00	18 unit	250.0 00.00 0,00	18 unit	250.0 00.00 0,00	18 unit	300.0 00.00 0,00	18 unit	500.0 00.00 0,00
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan		2 laporan	72.18 8.000, 00	4 Laporan	75.00 0.000, 00	4 Laporan	150.0 00.00 0,00	4 Laporan	150.0 00.00 0,00	4 Laporan	150.0 00.00 0,00	4 Laporan	300.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan Jejaringny a	Jaringan dan Jejaringny a													
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksana nya Peningkata n Kompetens i Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkata n Kompetens i Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Ora ng	0,00	30 Ora ng	150.0 00.00 0,00	30 Ora ng	200.0 00.00 0,00	30 Ora ng	200.0 00.00 0,00	30 Ora ng	200.0 00.00 0,00	30 Ora ng	350.0 00.00 0,00
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksana nya Dukungan Operasiona l Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasiona l Pelayanan KB Bergerak		6 lap ora n	118.1 16.16 0,00	20 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	20 Lap ora n	200.0 00.00 0,00	20 Lap ora n	350.0 00.00 0,00	20 Lap ora n	350.0 00.00 0,00	20 Lap ora n	350.0 00.00 0,00
Fasilitasi dan Pembinaan	Terlaksana nya kegiatan pembinaan	Jumlah kegiatan pembinaan			0,00			10 Keg	100.0 00.00 0,00	10 Keg	177.1 23.00 0,00	10 Keg	200.0 00.00 0,00	20 Lap	200.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pendamping an Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	fasilitasi dan pembinaan Pendampin gan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Tim Pendampin g Keluarga dalam melakukan Pendampin gan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan						iata n		iata n		iata n		ora n	
Pemberdaya an dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							200.0 00.00 0,00								
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksana nya pembinaan	Jumlah laporan hasil		2 Lap	58.88 0.800, 00										

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	terpadu di Kampung KB	pembinaan terpau Kampung KB		ora n											
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksana nya Fasilitasi Pengelolaa n Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB		77 Uni t	480.3 73.80 0,00	109 Uni t	200.0 00.00 0,00	14 1 Uni t	230.0 00.00 0,00	17 3 Uni t	250.0 00.00 0,00	20 5 Uni t	300.0 00.00 0,00	23 7 Uni t	400.0 00.00 0,00
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudn ya Pelaksanaa n dan Pengelolaa n Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaa n dan Pengelolaa n Program Bangga Kencana (Pembangu nan		44 Ka mp ung	250.0 30.00 0,00	82 ka mp ung	200.0 00.00 0,00	90 ka mp un g	400.0 00.00 0,00	90 ka mp un g	400.0 00.00 0,00	90 ka mp un g	400.0 00.00 0,00	90 ka mp un g	400.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)													
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		0,00	0,00	1 Dokumen	50.000,00	1 Dokumen	150.000,00	1 Dokumen	150.000,00	1 Dokumen	197.404,37	1 Dokumen	199.926,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengusahaan Remaja	90,40	90,90		91,40	4.884.800,00	91,80		92,20		92,60		93,00	
		Indeks Lansia Berdaya	56,50	57,40		58,20		59,10		59,90		60,70		61,40	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui							4.784.800,00								

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		1 Lap ora n	127.2 14.70 0,00										

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penumbuha n dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksana nya Penumbuh an dan Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Keterlibata n Perencana an Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuh an dan Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Keterlibata n Perencana an Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0,0 0	0,00	50 Kel uar ga	150.0 00.00 0,00	50 Kel uar ga	150.0 00.00 0,00	50 Kel uar ga	150.0 00.00 0,00	50 Kel uar ga	150.0 00.00 0,00	50 Kel uar ga	150.0 00.00 0,00
Pembentuka n dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Terlaksana nya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudk	Persentase sekolah lansia yang dilaksanak an di kelompok Bina Keluarga Lansia		0,0 0	0,00	50 Per sen	75.00 0.000, 00	50 Per sen	75.00 0.000, 00	50 Per sen	75.00 0.000, 00	50 Per sen	150.0 00.00 0,00	50 Per sen	350.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	an lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif														
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		0,00	0,00	2 Lap ora n	75.00 0.000, 00	2 Lap ora n	75.00 0.000, 00	2 Lap ora n	75.00 0.000, 00	2 Lap ora n	75.00 0.000, 00	2 Lap ora n	150.0 00.00 0,00
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan		5 Lap ora n	726.7 50.00 0,00	5 Lap ora n	50.00 0.000, 00	5 Lap ora n	50.00 0.000, 00	5 Lap ora n	50.00 0.000, 00	5 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	5 Lap ora n	250.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)													
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksana nya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(B KB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkata n Pendapata n Keluarga Akseptor	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkata n Pendapata n Keluarga Akseptor		20 Unit	165.7 01.10 0,00	10 Unit	150.0 00.00 0,00	10 Unit	150.0 00.00 0,00	10 Unit	150.0 00.00 0,00	10 Unit	200.0 00.00 0,00	10 Unit	300.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Akseptor (UPPKA)	(UPPKA) yang tersedia													
Orientasi/Pel atihan Teknis Pelaksana/K ader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksana nya Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkata n Pendapata n Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkata n Pendapata n Keluarga Akseptor (UPPKA)		120 Ora ng	132.0 82.40 0,00	120 Ora ng	900.0 00.00 0,00	12 0 Ora ng	150.0 00.00 0,00	12 0 Ora ng	150.0 00.00 0,00	12 0 Ora ng	150.0 00.00 0,00	12 0 Ora ng	150.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		0,00	0,00	50 Ora ng	100.0 00.00 0,00	50 Ora ng	100.0 00.00 0,00	50 Ora ng	100.0 00.00 0,00	50 Ora ng	100.0 00.00 0,00	50 Ora ng	100.0 00.00 0,00
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberday		0,00	0,00	2 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	2 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	2 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	2 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	2 Lap ora n	300.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Akseptor (UPPKA)	Ekonomi Keluarga/ UPPKA)	aan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)													
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Terlaksana nya Penyerasia n Kebijakan dalam Pelaksanaa n Program yang Mendukun g Tercapainy a iBangga (Indeks Pembangu nan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasia n Kebijakan dalam Pelaksanaa n Program yang Mendukun g Tercapainy a iBangga (Indeks Pembangu nan Keluarga)		0,0 0	0,00	1 Dok um en	150.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	150.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	150.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	150.0 00.00 0,00	1 Do ku me n	150.0 00.00 0,00
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)	Tersediany a biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan		0,0 0	0,00	112 7 Ora ng	2.000. 000.0 00,00	11 27 Ora ng	1.500. 000.0 00,00	11 27 Ora ng	2.000. 000.0 00,00	11 27 Ora ng	2.637. 604.3 72,00	11 27 Ora ng	2.700. 000.0 00,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan													
Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		0,00	0,00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	150.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersediany a biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkata n Pendapata n Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		394 Kel om pok	355.6 56.10 0,00	151 Kel om pok	824.8 00.00 0,00	15 1 Kel om pok	616.0 00.00 0,00	15 1 Kel om pok	617.1 23.00 0,00	15 1 Kel om pok	824.8 00.00 0,00	15 1 Kel om pok	1.064. 926.0 00,00
Penyediaan dan Pengembang an Materi iBangga (Indeks	Terlaksana nya Penyediaan dan Pengemban gan Materi iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengemban gan		Dok um en	0,00	1 Dok um en	35.00 0.000, 00	1 Do ku me n	35.00 0.000, 00	1 Do ku me n	35.00 0.000, 00	1 Do ku me n	35.00 0.000, 00	1 Do ku me n	35.00 0.000, 00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pembanguna n Keluarga)	(Indeks Pembangu nan Keluarga)	Materi iBangga (Indeks Pembangu nan Keluarga)													
Pembentuka n Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Dibentukn ya Kelompok Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia		30 Kel om pok	155.8 73.90 0,00	15 Kel om pok	150.0 00.00 0,00	15 Kel om pok	150.0 00.00 0,00	15 Kel om pok	150.0 00.00 0,00	15 Kel om pok	150.0 00.00 0,00	15 Kel om pok	150.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Akseptor (UPPKA) dan Pemberdaya an Ekonomi Keluarga)	Lansia (BKL), Usaha Peningkata n Pendapata n Keluarga Pendapata n Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Akseptor (UPPKA) dan Pemberday aan Pemberday aan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	(BKL), Unit Peningkata n Pendapata n Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk													
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangun an Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan							100.0 00.00 0,00								

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dan Kesejahteraan Keluarga															
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi		1 Lap ora n	81.12 5.100, 00										

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Keluarga/ UPPKS)	Keluarga/ UPPKS)													
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarak atan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdaya an Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Terlaksana nya pelaksanaa n Peningkata n Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyara katan dalam Pengelolaa n Program Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah organisasi Peningkata n Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyara katan dalam Pengelolaa n Program Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)		68 org ani sasi	117.2 11.60 0,00										

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		1 Lap ora n	1.446. 855.0 00,00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran)		1 Lap ora n	1.579. 830.0 00,00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00	1 Lap ora n	25.00 0.000, 00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
an, Baduta/Balit a)	Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelah iran, Baduta/Ba lita)	salin/kelah iran, Baduta/Ba lita) yang mendapat pendampin gan													
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarak atan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembanguna n Keluarga	Terlaksana nya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyara katan dalam Penggeraka n Operasiona l Pembinaan Program Pembangu nan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyara katan dalam Penggeraka n Operasiona l Pembinaan Program Pembangu nan Keluarga		0,0 0	0,00	1 Lap ora n	50.00 0.000, 00	1 Lap ora n	50.00 0.000, 00	1 Lap ora n	50.00 0.000, 00	1 Lap ora n	50.00 0.000, 00	1 Lap ora n	150.0 00.00 0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN							9.983. 031.0 76,00								

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DAERAH KABUPATEN /KOTA															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedian ya Dokumen Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		43 Do ku me n	0,00	42 Do ku me n	481.5 63.68 6,00								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusun nya Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah		4 Dok um en	638.6 89.74 0,00	3 Dok um en	150.0 00.00 0,00	3 Do ku me n	300.0 00.00 0,00	3 Do ku me n	350.0 00.00 0,00	3 Do ku me n	400.0 00.00 0,00	3 Do ku me n	400.0 00.00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksana nya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Lap ora n	86.11 2.400, 00	12 Lap ora n	100.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	150.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	150.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	150.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	150.0 00.00 0,00
Koordinasi dan Penyusunan	Tersusun nya Capaian	Jumlah laporan Capaian		12 Lap	24.36 0.800, 00	0,0 0		12 Lap	30.00 0.000, 00	12 Lap	30.00 0.000, 00	12 Lap	30.00 0.000, 00	12 Lap	30.00 0.000, 00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		ora n				ora n		ora n		ora n		ora n	
Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselengg aranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dok umen	15.41 0.000, 00	1 Dok umen	50.00 0.000, 00	1 Do ku me n	50.00 0.000, 00	1 Do ku me n	75.00 0.000, 00	1 Do ku me n	75.00 0.000, 00	1 Do ku me n	75.00 0.000, 00
Pelaksanaan Pengumpul an Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksana nya Pengumpul an Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpul kan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Dat a	195.3 59.00 0,00	1 Dat a	151.5 63.68 6,00	1 Dat a	250.0 00.00 0,00	1 Dat a	250.0 00.00 0,00	1 Dat a	250.0 00.00 0,00	1 Dat a	250.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksana nya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusuna n Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusuna n Dokumen Perencana an Perangkat Daerah		1 Berita Acara	10.74 2.000, 00	1 Berita Acara	30.00 0.000, 00	1 Berita Acara	50.00 0.000, 00	1 Berita Acara	50.00 0.000, 00	1 Berita Acara	50.00 0.000, 00	1 Berita Acara	50.00 0.000, 00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusun nya Dokumen Perencana an Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencana an Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		Dok um en	0,00	Dok um en		Do ku me n	10.00 0.000, 00	Do ku me n	10.00 0.000, 00	Do ku me n	10.00 0.000, 00	Do ku me n	10.00 0.000, 00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Administ rasi Keu angan Perangk at Daer ah	Tersedi an Dokum en Admin istrasi Keu angan Perangk at Daer ah Yang Akuntabel	Jumlah Dokum en Admin istrasi Keu angan Perangk at Daer ah Yang Akuntabel		12 Do ku me n	0,00	12 Do ku me n	8.122. 580.6 12,00								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedian ya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		64/ Org /Bl n	7.571. 908.9 64,00	71/ Org /Bl n	7.872. 580.6 12,00	73 /Or g/ Bln	8.640. 524.1 90,00	73 /Or g/ Bln	8.640. 524.1 90,00	73 /Or g/ Bln	8.640. 524.1 90,00	73 /Or g/ Bln	8.640. 524.1 90,00
Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi SKPD	Terlaksana nya Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi SKPD	Jumlah Dokum en Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi SKPD		Dok um en	0,00	Dok um en			10.00 0.000, 00						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedian ya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Lap ora n	16.50 4.000, 00	1 Lap ora n		1 Lap ora n	15.00 0.000, 00	1 Lap ora n	15.00 0.000, 00	1 Lap ora n	15.00 0.000, 00	1 Lap ora n	15.00 0.000, 00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersediany a Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD		12 Lap ora n	196.3 72.00 0,00	12 Lap ora n	250.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	250.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	250.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	250.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	250.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dok um en	14.48 8.000, 00	1 Dok um en		1 Do ku me n	10.00 0.000, 00	1 Do ku me n	10.00 0.000, 00	1 Do ku me n	10.00 0.000, 00	1 Do ku me n	10.00 0.000, 00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							55.00 0.000, 00								
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok um en	0,00	1 Dok um en	25.00 0.000, 00								
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		2 lap ora n	215.0 00.00 0,00	2 lap ora n	30.00 0.000, 00	2 lap ora n	50.00 0.000, 00	2 Lap ora n	50.00 0.000, 00	2 Lap ora n	60.00 0.000, 00	2 Lap ora n	60.00 0.000, 00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Daerah pada SKPD	Daerah pada SKPD													
Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksana nya Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Lap ora n	0,00	2 Lap ora n		2 Lap ora n	50.00 0.000, 00	2 Lap ora n	50.00 0.000, 00	2 Lap ora n	50.00 0.000, 00	2 Lap ora n	50.00 0.000, 00
Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah															
Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan					296.3 73.00 0,00										
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Tersediany a Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an		pak et	0,00	pak et		70 Ora ng	5.000. 000,0 0	70 Ora ng	5.000. 000,0 0	70 Ora ng	5.000. 000,0 0		0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Ora ng	0,00	Ora ng		20 Ora ng	145.0 00.00 0,00	15 Ora ng	135.0 00.00 0,00	15 Ora ng	135.0 00.00 0,00	15 Ora ng	135.0 00.00 0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah							398.4 03.20 0,00								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Pak et	150.0 00.00 0,00	4 Pak et	100.0 00.00 0,00	5 Pak et	150.0 00.00 0,00	5 Pak et	150.0 00.00 0,00	5 Pak et	150.0 00.00 0,00	5 Pak et	150.0 00.00 0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Pak et	80.00 0.000, 00	4 Pak et	60.00 0.000, 00	4 Pak et	100.0 00.00 0,00	4 Pak et	100.0 00.00 0,00	4 Pak et	100.0 00.00 0,00	4 Pak et	100.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	19.99 9.800, 00	3 Paket	19.99 9.800, 00	3 Paket	19.99 9.800, 00	3 Paket	19.99 9.800, 00	3 Paket	19.99 9.800, 00	3 Paket	19.99 9.800, 00
Penyediaan Bahan/Mate rial	Tersedianya Bahan/Ma terial	Jumlah Paket Bahan/Ma terial yang Disediakan		Paket	0,00	5 pak et	75.00 0.000, 00	3 Pak et	105.0 00.00 0,00	3 Pak et	105.0 00.00 0,00	4 Pak et	110.0 00.00 0,00	4 Pak et	110.0 00.00 0,00
Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana nya Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Lap ora n	103.0 33.40 0,00	40 Lap ora n	93.40 3.400, 00	40 Lap ora n	136.8 98.62 2,00	40 Lap ora n	135.5 00.00 0,00	45 Lap ora n	145.0 00.00 0,00	45 Lap ora n	145.0 00.00 0,00
Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksana nya Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dok um en	125.0 00.00 0,00	1 Dok um en	50.00 0.000, 00	1 Do ku me n	75.00 0.000, 00	1 Do ku me n	75.00 0.000, 00	1 Do ku me n	80.00 0.000, 00	1 Do ku me n	80.00 0.000, 00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							137.5 82.00 0,00								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediany a Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Uni t	0,00	Uni t		2 Uni t	20.00 0.000, 00	2 Uni t	20.00 0.000, 00	2 Uni t	20.00 0.000, 00	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediany a Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Disediakan		Uni t	0,00	Uni t		1 Uni t	7.500. 000,0 0	1 Uni t	7.500. 000,0 0	0,0 0	-	0,0 0	-
Pengadaan Peralatan	Tersediany a Peralatan	Jumlah Unit Peralatan		11 Uni t	37.58 2.000, 00	2 Uni t	37.58 2.000, 00	15 Uni t	101.5 00.00 0,00	15 Uni t	100.0 00.00 0,00	17 Uni t	119.3 98.62 2,00	25 Uni t	150.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediany a Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Uni t	0,00	Uni t	100.0 00.00 0,00	1 Uni t	178.5 00.00 0,00	1 Uni t	175.0 00.00 0,00	1 Uni t	155.0 00.00 0,00	1 Uni t	150.0 00.00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediany a Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		15 Uni t	135.0 00.00 0,00	7 Uni t		45 Uni t	290.0 00.00 0,00	30 Uni t	240.0 00.00 0,00	25 Uni t	170.0 00.00 0,00	20 Uni t	160.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah							640.0 00.00 0,00								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediany a Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lap ora n	414.8 88.20 0,00	12 Lap ora n	420.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	420.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	420.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	420.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	420.0 00.00 0,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Tersediany a Jasa Peralatan dan perlengkap an kantor	Jumlah LaporanPe nyediaan Jasa Peralatan dan perlengkap an kantor		12 Lap ora n	75.00 0.000, 00	12 Lap ora n		12 Lap ora n	75.00 0.000, 00	12 Lap ora n	75.00 0.000, 00	12 Lap ora n	75.00 0.000, 00	12 Lap ora n	75.00 0.000, 00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediany a Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		12 Lap ora n	633.4 08.30 8,00	0,0 0	220.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	230.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	230.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	230.0 00.00 0,00	12 Lap ora n	235.0 00.00 0,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Kantor yang Disediakan													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							147.901.578,00								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya		0,00	0,00	0,00		3 Unit	17.500.000,00	3 Unit	18.898.622,00	3 Unit	17.500.000,00	3 Unit	17.500.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		84 Unit	33.030.000,00	126 Unit	97.901.578,00	54 Unit	97.901.578,00	54 Unit	97.901.578,00	54 Unit	97.901.578,00	54 Unit	97.901.578,00

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KE GIATAN/SU B KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BA SE LIN E 20 20 4	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	0,00	Unit	50.00 0.000, 00	2 Unit	100.0 00.00 0,00	2 Unit	100.0 00.00 0,00	2 Unit	100.0 00.00 0,00	2 Unit	104.3 98.62 2,00
Jumlah					23.89 8.894. 081,0 0		18.68 2.831. 076,0 0		22.64 8.750. 421,8 8		24.17 1.514. 207,3 3		27.28 2.537. 307,4 2		31.14 0.104. 508,9 9

Berdasarkan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban peran strategis dan tanggung jawab besar dalam mewujudkan cita-cita daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi "Kukar Idaman Terbaik: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan" menuntut semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkontribusi. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kontribusi ini diwujudkan melalui program prioritas Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), yang secara langsung menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengarah pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dan berkarakter, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan yang diukur melalui persentase keluarga sejahtera.

Tabel 4.3 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan"	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Misi 1: Terbaik dalam Mewujudkan Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Dasar, Pendidikan, dan Kesehatan Sosial				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	

Fokus utama DPPKB dalam periode 2025-2029 adalah memastikan bahwa setiap keluarga di Kutai Kartanegara dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dan berkelanjutan. Target utamanya adalah peningkatan kualitas SDM melalui berbagai inisiatif Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk yang efektif. Peningkatan ini adalah sasaran kunci untuk mencapai outcome berupa peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan, yang secara inheren akan meningkatkan daya saing daerah. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) menjadi kendaraan utama untuk mencapai sasaran ini. Keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari angka statistik semata, melainkan dari indikator nyata berupa peningkatan persentase keluarga yang hidup sejahtera. Keterkaitan langsung antara Visi Kukar Idaman Terbaik dengan Program Prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini menegaskan bahwa pembangunan SDM dan ketahanan keluarga adalah inti dari pembangunan daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

**Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas
Pembangunan Daerah**

PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PROGRAM STRATEGIS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Program makan bergizi gratis untuk balita dan lansia	Meningkatny a pemberdayaa n dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
			2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	

			2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
			2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
			2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
			2.14.03.2.03.0017 Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	

Seluruh program dan kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk mewujudkan pengendalian penduduk yang optimal, pemberdayaan keluarga sejahtera, serta peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan administrasi pemerintahan daerah, dengan indikator yang jelas dan terukur, serta pendanaan yang direncanakan akan mendukung pelaksanaan program secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, dengan harapan program ini mampu menjawab tantangan pembangunan kependudukan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sinergi antara pemangku kepentingan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja sasaran RPJMD 2025-2029 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	68,10	69,20	70,20	71,20	72,10	73,00
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	78,50	82,70	85,40	87,10	88,20	88,80

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,19	2,19	2,18	2,18	2,17	2,17
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	80,3	80,3	80,3	80,3	80,4	80,4
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	12,3	10,7	9,6	8,9	8,4	8,1

Data capaian historis Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dianalisis pada Bab II menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan meyakinkan pada Indeks Pembangunan Keluarga. Meskipun data tahun 2020 belum tersedia (n.a), sejak tahun 2021, indeks ini telah menunjukkan kenaikan yang stabil dari 54,9 menjadi 66,96 pada akhir tahun 2024. Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga sebesar lebih dari 12 poin dalam kurun waktu empat tahun ini mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga di berbagai dimensi, seperti ketahanan fisik, ekonomi, dan sosial-psikologi. Kenaikan tahunan yang gradual, misalnya dari 58,6 (2022) menjadi 63,34 (2023), mencerminkan implementasi program Keluarga Berencana dan pemberdayaan keluarga yang efektif dan berkelanjutan, menjadikannya fondasi kuat untuk target pembangunan di masa depan.

Sementara itu, data Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) memiliki pola pencatatan yang berbeda. Indikator ini baru tercatat capaiannya secara eksplisit pada tahun terakhir, yaitu 2024, dengan nilai 71,9. Indikator ini secara umum merupakan indikator baru sehingga data tersedia terbatas. Namun, capaian awal sebesar 71,9 merupakan angka yang cukup solid dan menjanjikan. Angka ini menunjukkan bahwa aspek-aspek kependudukan—seperti struktur usia, mobilitas, dan kualitas SDM—telah mulai dipertimbangkan dan diintegrasikan secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah, menegaskan komitmen terhadap pembangunan yang memperhatikan dinamika demografi.

Tren historis yang diperlihatkan oleh kedua IKU ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan ke depan. Kenaikan Indeks Pembangunan Keluarga yang stabil memberikan optimisme bahwa target yang lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang dapat dicapai, namun juga menantang pengelola program untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang sudah tinggi. Capaian awal IPBK yang kuat di tahun 2024 menjadi titik acuan penting untuk penetapan target tahunan yang ambisius, mendorong upaya percepatan integrasi wawasan kependudukan ke dalam semua sektor. Secara keseluruhan, data historis ini memvalidasi efektivitas program-program yang

telah berjalan dan menjadi dasar untuk merancang strategi yang lebih fokus dan terarah guna mencapai visi pembangunan daerah yang sejahtera dan berkelanjutan.

Dalam periode perencanaan yang tercakup dalam Renstra DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 hingga 2029, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan menunjukkan upaya berkelanjutan dan komprehensif dalam meningkatkan berbagai aspek pembangunan sosial dan kependudukan di daerah. Sebagai fondasi kebijakan yang ditujukan untuk mengoptimalkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terdapat sejumlah indikator kunci yang dijadikan tolak ukur kemajuan program-program yang relevan.

Dengan demikian, kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan selama periode Renstra ini menggambarkan sebuah proses yang dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan serta tantangan yang berkembang. Melalui perencanaan yang matang dan eksekusi yang disiplin, diharapkan setiap indikator tidak hanya mencapai target yang telah ditetapkan tetapi juga memberikan dampak nyata dalam peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun secara optimal dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan semangat kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, Renstra ini diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Renstra DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan program pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, dan pembangunan ketahanan keluarga. Perencanaan yang matang ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kependudukan dan keluarga secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Implementasi Renstra ini diharapkan menjadi komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, demi mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
- b. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahunan.
- c. Kepala Dinas melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan hasil Evaluasi Renja.

- d. Evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- e. Jika berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan Renstra, maka akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini akan menjadi indikator keberhasilan dalam memenuhi target pembangunan keluarga berkualitas serta pengendalian penduduk. Namun, jika terdapat beberapa target yang belum tercapai, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program pada periode berikutnya. Dengan demikian, Renstra ini berperan sebagai pijakan strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tenggarong , Oktober 2025

Plt.Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara



Dane Hartanto, S.Sos., M.Si

NIP. 197009241990 03 1 001